



LAPORAN KINERJA

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Tahun Anggaran 2024



20
24

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Gedung C, Lantai 8, Wing C, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025
Inspektur IV

Drh. Pujo Harmadi, MP
NIP. 197405232002121002

KATA PENGANTAR

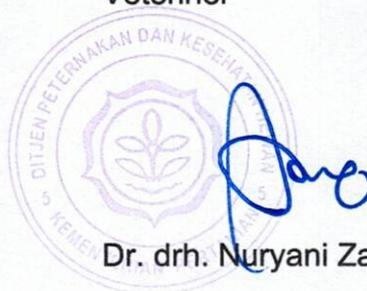
Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, agar pelaksanaannya semakin efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Kesehatan Masyarakat
Veteriner



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si sf



DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Grafik</i>	<i>vii</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>viii</i>
<i>Daftar Lampiran</i>	<i>ix</i>
<i>I. Pendahuluan</i>	<i>1</i>
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Maksud dan Tujuan</i>	<i>2</i>
<i>C. Organisasi dan Tata Kerja</i>	<i>1</i>
<i>D. Sumber Daya Manusia</i>	<i>6</i>
<i>E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)</i>	<i>7</i>
<i>F. Dukungan Anggaran</i>	<i>12</i>
<i>II. Perencanaan Kinerja</i>	<i>13</i>
<i>A. Rencana Strategis (Renstra)</i>	<i>13</i>
<i>B. Arah Kebijakan dan Strategi</i>	<i>15</i>
<i>C. Perjanjian Kinerja</i>	<i>15</i>
<i>III. Akuntabilitas Kinerja</i>	<i>18</i>
<i>A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran</i>	<i>18</i>
<i>B. Pencapaian Sasaran PK Tahun 2024</i>	<i>18</i>
<i>C. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja</i>	<i>22</i>
3.1. <i>Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Non Pangan yang Diterima Negara Tujuan Karena Alasan Mutu dan Keamanan Produk Terhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan</i>	<i>22</i>
3.2. <i>Rasio Penjaminan Daging Ruminansia yang Aman dan Layak Dikonsumsi Terhadap Total Ternak Ruminansia yang Dipotong</i>	<i>27</i>
3.3. <i>Rasio Penjaminan Daging Unggas yang Aman dan Layak Dikonsumsi Terhadap Total Ternak Unggas yang Dipotong ..</i>	<i>32</i>
3.4. <i>Rasio Penjaminan Daging Babi yang Aman dan Layak</i>	



	<i>Dikonsumsi Terhadap Total Ternak Babi yang Dipotong</i>	<i>36</i>
3.5.	<i>Rasio Produk Susu yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Produk Susu yang Dihasilkan</i>	<i>40</i>
3.6.	<i>Rasio Produk Telur yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Produk Telur yang Dihasilkan</i>	<i>43</i>
3.7.	<i>Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan</i>	<i>48</i>
3.8.	<i>Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner.....</i>	<i>53</i>
3.9.	<i>Persentase Wilayah yang Terkendali Dari Zoonosis</i>	<i>59</i>
3.10.	<i>Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Dimanfaatkan</i>	<i>65</i>
D.	<i>Capaian Rincian Output (RO)</i>	<i>71</i>
1.	<i>Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner.....</i>	<i>71</i>
2.	<i>Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner.....</i>	<i>73</i>
3.	<i>Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan</i>	<i>74</i>
4.	<i>Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>75</i>
E.	<i>Realisasi Anggaran</i>	<i>71</i>



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner per Mata Anggaran Tahun 2024</i>	12
<i>Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024</i>	16
<i>Tabel 3. Capaian Sasaran PK Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024</i>	19
<i>Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian Sasaran PK Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024</i>	21
<i>Tabel 5. Capaian Sasaran Indikator Kerja (output) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024</i>	22
<i>Tabel 6. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan</i>	23
<i>Tabel 7. Jumlah Daging Ruminansia di RPHR Ber-NKV</i>	29
<i>Tabel 8. Jumlah Daging Ruminansia di Seluruh RPHR</i>	29
<i>Tabel 9. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong</i>	29
<i>Tabel 10. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong</i>	33
<i>Tabel 12. Target Tahun 2020-2024 dan Realisasi Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan</i>	41
<i>Tabel 13. Target Tahun 2020-2024 dan Realisasi Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan</i>	45



<i>Tabel 14. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 15. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 16. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 17. Pemanfaatan Fasilitas Sarana Laboratorium Kesmavet BPMSPH Bogor Tahun 2023.....</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 18. Jumlah Sampel Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) di BPMSPH Bogor Tahun 2024.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis.....</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 20. Unit Penanganan Hewan yang Memenuhi Persyaratan Penerapan Kesejahteraan Hewan.....</i>	<i>67</i>
<i>Tabel 21. Capaian Indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Dimanfaatkan</i>	<i>67</i>
<i>Tabel 22. Target dan Realisasi Sarana dan Prasarana Kesmavet</i>	<i>74</i>
<i>Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabel 24. Realisasi Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>75</i>
<i>Tabel 25. Nilai Efisiensi Anggaran Direktorat Kesmavet Tahun 2023</i>	<i>77</i>



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2. Data Ekspor Pangan Berdasarkan Penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 3. Data Ekspor Non Pangan Berdasarkan Penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 5. Data Sebaran Negara Tujuan Ekspor Produk Non Pangan Berdasarkan Penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024.....</i>	<i>26</i>



DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 1. Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong Tahun 2020-2024.....</i>	<i>31</i>
<i>Grafik 2. Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong Tahun 2020-2024.....</i>	<i>35</i>
<i>Grafik 3. Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong Tahun 2020-2024... </i>	<i>35</i>
<i>Grafik 4. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024.</i>	<i>51</i>



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024</i>	<i>81</i>
<i>Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024.....</i>	<i>82</i>
<i>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 Revisi-1</i>	<i>85</i>
<i>Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 Revisi-1</i>	<i>87</i>
<i>Lampiran 5. Data jumlah VHC (Veterinary Health Sertificate) yang telah diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2024</i>	<i>90</i>
<i>Lampiran 6. Data Pemotongan RPHR ber-NKV Tahun 2024</i>	<i>93</i>
<i>Lampiran 7. Data Pemotongan Sapi di Seluruh Indonesia Tahun 2024 .</i>	<i>104</i>
<i>Lampiran 8. Data Pemotongan di RPHU Ber NKV sampai Tahun 2024</i>	<i>106</i>
<i>Lampiran 9. Data Pemotongan Unggas di Seluruh Indonesia sampai Tahun 2024.....</i>	<i>111</i>
<i>Lampiran 10. Data Jumlah Pemotongan Ternak Babi di RPHB Ber NKV sampai Tahun 2024</i>	<i>112</i>
<i>Lampiran 11. Data Pemotongan Ternak Babi di Seluruh Indonesia Tahun 2024.....</i>	<i>113</i>
<i>Lampiran 12. Data sampel Produk Hewan Pangan yang telah diuji 2024</i>	<i>114</i>
<i>Lampiran 13. Hasil kuisisioner terhadap tingkat kemanfaatan sarana prasana kesmavet.....</i>	<i>116</i>
<i>Lampiran 14. Status wilayah terhadap kasus penyakit Rabies dan Anthrax pada tahun 2024 dibandingkan dengan kasus di tahun 2023.</i>	<i>124</i>
<i>Lampiran 15. Realisasi Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah Disusun.....</i>	<i>126</i>



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang kondusif untuk membentuk sumber daya manusia aparatur yang profesional dan handal merupakan tuntunan masyarakat dan lingkungan strategis baik ditingkat nasional maupun global terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kian mendesak dan tidak dapat ditunda lagi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan hal tersebut adalah melalui manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, maka setiap instansi pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis, serta penerapan kesejahteraan hewan. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner disusun untuk memberikan gambaran dan pertanggungjawaban kinerjanya dalam mencapai tujuan atau sasaran kegiatan, program dan kebijakan serta menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan tersebut dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja setiap akhir tahun.

Laporan kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai salah satu unit kerja Eselon II dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan



kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;

- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, pengawasan kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:

- a. Kelompok Zoonosis

Kelompok Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang zoonosis.

- 1) Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta



pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis.

2) Tim Kerja Penanggulangan Zoonosis

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan zoonosis.

b. Kelompok Kesejahteraan Hewan

Kelompok Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan hewan.

1) Tim Kerja Advokasi Kesejahteraan Hewan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang advokasi kesejahteraan hewan.

2) Tim Kerja Penerapan Kesejahteraan Hewan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan kesejahteraan hewan.

c. Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan

Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan produk hewan.

1) Tim Kerja Pengawasan Unit Usaha dan Surveilans

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan unit usaha dan surveilans keamanan produk hewan.



2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran produk hewan.

d. Kelompok Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi

Kelompok Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sanitari, sertifikasi dan registrasi.

1) Tim Kerja Sanitari

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sanitari.

2) Tim Kerja Sertifikasi dan Registrasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi dan registrasi.

e. Kelompok Substansi Higiene, Sanitasi dan Penerapan

Kelompok Substansi Higiene, Sanitasi dan Penerapan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene dan sanitasi, serta penerapan dan penilaian.

1) Tim Kerja Higiene dan Sanitasi

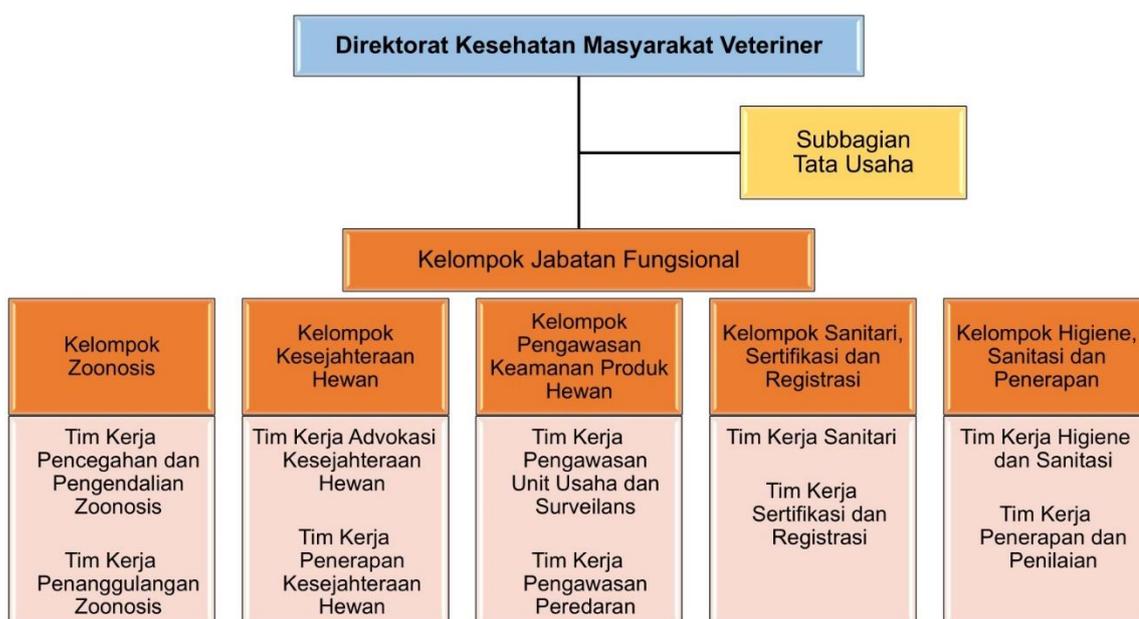
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene dan sanitasi.

2) Tim Kerja Penerapan dan Penilaian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan penilaian.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

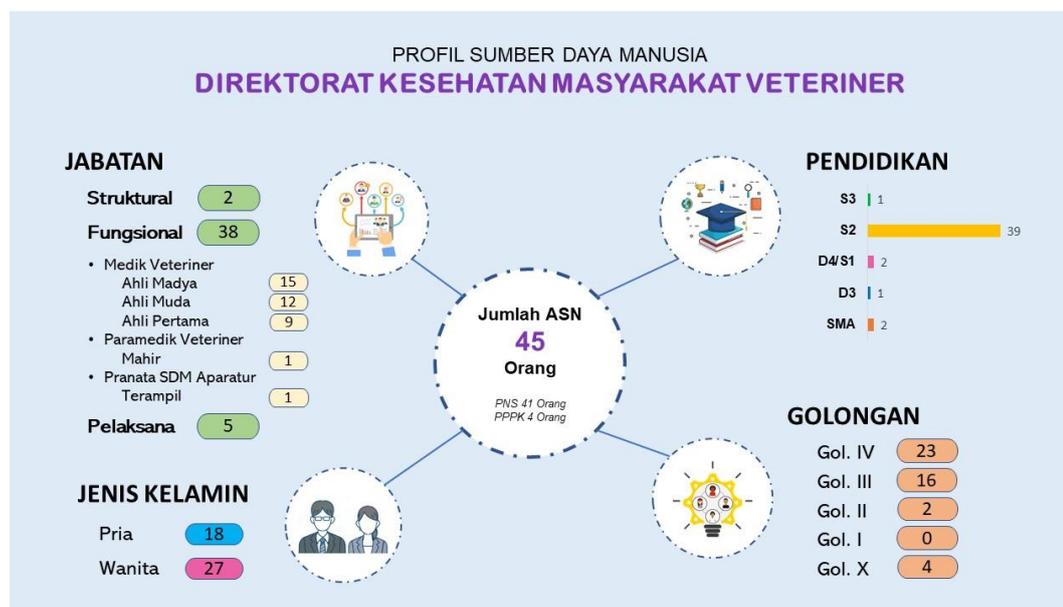
D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu unsur penting dalam keberhasilan kinerja organisasi. SDM Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner per 31 Desember 2024 sebanyak 45 pegawai yang terdiri dari 41 pegawai negeri sipil (PNS) dan 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian terlampir dalam Lampiran 1. Pada tahun 2024 terdapat penambahan PPPK sebanyak 2 orang dan pegawai yang pension sebanyak 3 orang. SDM Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari beragam latar belakang berdasarkan, jenjang pendidikan, jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, maupun status kepangkatan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai menurut jabatan: Medik Veteriner sebanyak 37 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 1 orang; Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang, JFU/Pelaksana sebanyak 6 orang; dan Struktural sebanyak 2 orang;



2. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 1 orang; S-2 sebanyak 39 orang; S-1/D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SLTA/ sederajat 2 orang;
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 23 orang; Golongan III sebanyak 16 orang; Golongan II sebanyak 2 orang; dan Golongan X (PPPK) sebanyak 4 orang;
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 27 orang.



Gambar 2. Profil Sumber Daya Manusia Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (per 31 Desember 2024)

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Kasus pembuangan susu yang belakangan terjadi disebabkan adanya pengurangan kuota penyerapan susu oleh IPS dikarenakan stok produk berlebih di IPS karena turunnya daya beli susu oleh masyarakat dan adanya *maintenance* mesin di pabrik IPS. Selain itu penolakan susu oleh IPS juga dikarenakan kualitas susu segar dibawah standar yang ditetapkan IPS. Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementan dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian telah mengadakan pertemuan Koordinasi yang mempertemukan Koperasi Peternak/Pengepul dengan Industri Pengolahan Susu pada 11 November 2024, yang saat itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, dengan tujuan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi dan meminta komitmen IPS untuk kembali menyerap susu peternak tanpa pengurangan kuota. Pertemuan tersebut



kemudian dilanjutkan dengan acara Penandatanganan MoU antara GKSI dan AIPS serta MoU perwakilan 5 IPS dengan 5 Koperasi/KUD/pegepul pada 14 November 2024 di Pasuruan, yang diikuti dengan acara Minum Susu Bersama 10.000 anak SD-SMP di Kabupaten Pasuruan. Pada acara tanggal 11 dan 14 November tersebut, IPS menyampaikan komitmen akan menyerap kembali semua susu produksi Koperasi/KUD/pegepul asalkan memenuhi mutu/kualitas yang ditetapkan oleh IPS. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan/monitoring terpadu terkait realisasi/tindak lanjut dari komitmen penyerapan dan standar mutu yang disepakati IPS dan Koperasi, serta implementasi penerapan keamanan pangan di unit pengumpulan susu segar di Koperasi/KUD/pegepul dan IPS.

Sehubungan dengan komitmen penyerapan susu segar oleh IPS, Ditjen PKH telah membentuk Tim Monitoring Penyerapan Susu, yang melibatkan Tim dari Direktorat Kesmavet dan Direktorat PPHNak, Tim dari Satgas Pangan POLRI, Tim dari Inspektorat IV dan Tim Lab Kesmavet UPT (BPMSPH dan BBVet Wates) serta Tim Lab Kesmavet UPTD (Lab Kesmavet Boyolali dan Lab Kesmavet Malang). Telah dilaksanakan monitoring oleh Tim Terpadu bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kab/Kota pada 3-21 Desember 2024. Monitoring dilakukan pada 2 Peternakan Sapi Perah (KSPP Blitar dan BBPTU-HPT Baturraden); 12 IPS dan 28 Koperasi/Pengepul di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Tim melakukan wawancara dengan IPS, Koperasi/Pengepul dan peternak untuk memperoleh informasi serta melakukan pengambilan sampel susu untuk pengujian keamanan dan mutu susu segar. Khusus Tim Terpadu yang beranggotakan perwakilan dari Ditjen PKH dan UPT Laboratorium Kesmavet, melaksanakan kegiatan monitoring di 3 (tiga) lokasi yaitu : Kab. Pasuruan, Kab. Boyolali dan Kab. Blitar.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan rencana aksi P2SDN khususnya untuk peningkatan produksi susu. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut tahun 2025 untuk peningkatan kualitas susu dalam negeri adalah:

1. Melakukan pembinaan penerapan cara yang baik (praktek higiene sanitasi) dalam penanganan susu segar terutama pada unit budidaya sapi perah.
2. Memperkuat kapasitas Laboratorium Kesmavet baik pusat dan daerah untuk



mendukung layanan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Mendorong koperasi/pegepul susu untuk dapat mengembangkan usaha pengolahan susu, sehingga tidak harus bergantung pada IPS untuk menyerap susu
4. Meningkatkan kapasitas SDM peternak/koperasi terkait dengan penerapan cara yang baik dan pengolahan susu.
5. Meningkatkan kapasitas SDM koperasi untuk dapat melakukan pengujian laboratorium sesuai dengan standar susu segar
6. Mendorong Laboratorium Kesmavet daerah agar dapat lebih berperan dalam monitoring dan surveilans keamanan dan mutu susu segar di wilayah masing-masing

Seiring dengan rencana penambahan populasi sapi perah tahun 2025-2026 sebagai upaya Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN), maka peningkatan keamanan dan kualitas susu segar dalam negeri menjadi sangat penting agar dapat memiliki daya saing dan sesuai standar yang dibutuhkan oleh IPS, sehingga produksi susu seluruhnya dapat diserap untuk kebutuhan nasional.

Terkait dengan wilayah terkendali zoonosis yang mempertimbangkan kasus rabies dan antraks bahwa telah terjadi kematian manusia akibat rabies sebanyak 103 orang yang tersebar di Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Riau serta kasus antraks pada manusia sebanyak 39 orang di Provinsi DI Yogyakarta dan Procinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan melalui surat nomor Pv.03.06/C.III/107/2025, tercatat sebanyak 26 provinsi masih menjadi endemis rabies, sementara hanya 12 provinsi yang dinyatakan bebas dari penyakit ini. Jumlah Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 149.039 kasus, dengan kasus kematian mencapai 103 jiwa di 12 provinsi. Lima provinsi dengan kasus kematian tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (45 kasus), Sumatera Utara (13 kasus), Nusa Tenggara Barat (10 kasus), Kalimantan Barat (7 kasus), dan Bali (6 kasus). Provinsi dengan jumlah kasus GHRP tertinggi pada tahun 2024 adalah Bali (48.859 kasus) dan Nusa Tenggara Timur (24.472 kasus).



Terkait dengan kasus Antraks, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Tahun 2024, telah terjadi kasus antraks sebanyak 38 orang di DI Yogyakarta, 8 orang di Jawa Timur dan 1 orang di Sulawesi Selatan. Hingga akhir tahun 2024 terdapat penambahan kasus di Sulawesi Selatan.

Beberapa kendala yang menjadi tantangan utama dalam pencegahan zoonosis (rabies dan antraks) meliputi:

- a) **Kesadaran masyarakat yang rendah**, rendahnya pemahaman tentang pentingnya pencegahan zoonosis menghambat upaya pengendalian.
- b) **Populasi hewan rentan yang tidak divaksinasi**, kondisi ini berkontribusi pada penyebaran agen penyakit, baik ke hewan lain maupun manusia.
- c) **Jumlah vaksin pada hewan kurang memadai**, sehingga mengakibatkan siklus wabah dan penularannya ke manusia terus berulang.
- d) **Kurangnya kapasitas SDM dan sarana**, terbatasnya pengetahuan dan pelatihan terkait pencegahan zoonosis, manajemen rantai dingin, distribusi vaksin ke daerah terpencil.
- e) **Kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga**, sehingga upaya edukasi kepada masyarakat kurang optimal.

Untuk mengatasi situasi rabies di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya:

- a) Mengarahkan upaya pengendalian di provinsi dengan kasus zoonosis tertinggi, seperti mempercepat program vaksinasi.
- b) Membangun sinergi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan sektor terkait lainnya melalui pendekatan *One Health* sehingga meningkatkan respon tepat waktu terhadap kasus zoonosis.
- c) Edukasi kepada masyarakat dan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian zoonosis.
- d) Memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur melalui pelatihan dan penguatan rantai dingin.



Sejarah dunia menyebutkan pada tanggal 4 Oktober 1931 di Italia diadakan kongres sebagai penetapan hari binatang se dunia (world animal day) pertama kalinya. Hari Hewan Dunia merupakan hari aksi internasional untuk melindungi hak-hak hewan dan kesejahteraannya yang peringatan setiap tahunnya pada tanggal 4 Oktober di beberapa belahan dunia (Sumber WOAHA). Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner telah dibentuk pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/2000. Pelaksanaan pengaturan dalam bidang kesmavet telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18/2009 jo Undang-undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Kesejahteraan hewan menjadi bagian dari tugas fungsi Direktorat Kesmavet sejak tahun 2003, dan pada Tahun 2015, fungsi kesejahteraan hewan mengalami peningkatan eselonering sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dalam menghadapi tantangan global dalam wadah Subdit Kesejahteraan Hewan yang sekarang menjadi Kelompok Kerja Kesejahteraan Hewan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan yaitu Penerapan Kesejahteraan Hewan yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi rasa bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.



F. DUKUNGAN ANGGARAN

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024, didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.244.610.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Tabel 1. Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No	RO	Target	Satuan	Pagu Anggaran
1	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Kegiatan	1.500.000.000
2	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	NSPK	1.500.000.000
3	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	2.500	Produk	656.771.000
4	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	Unit	587.839.000
	Total			4.244.610.000

Sumber: Kelompok Substansi Keuangan dan Perlengkapan, 2024.



II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2024, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2020 – 2024 (Revisi ke-2 Renstra Direktorat Kesmavet).

VISI

Visi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah “Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat veteriner melalui penyediaan produk hewan yang sehat, aman dan bermutu serta pencegahan penularan zoonosis”.

MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner telah ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan;
2. Meningkatkan penjaminan produk hewan dalam hal keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan;
3. Meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan;
4. Mengendalikan dan menanggulangi zoonosis; dan
5. Meningkatkan implementasi *One Health* dalam upaya penjaminan keamanan pangan dan pengendalian zoonosis.

TUJUAN

Tujuan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah:

1. Tersedianya produk hewan yang aman, sehat dan bermutu;
2. Terkendalinya penularan zoonosis dari hewan ke manusia; dan
3. Meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan.



SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah:

1. Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitari produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan;
2. Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi Masyarakat;
3. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat;
5. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak;
6. Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner; dan
7. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Terkait dengan Program Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Berkualitas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Kegiatan Direktorat Kesmavet diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak, terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak, meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan, tersedianya sarana prasana peternakan dan meningkatnya luas wilayah yang terkendali zoonosis. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kebijakan dan strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:

1. Kebijakan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - a. Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis produk hewan;
 - b. Pengawasan keamanan dan mutu produk hewan;
 - c. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - a. Penerapan higiene sanitasi;
 - b. Pengaturan peredaran produk hewan;
 - c. Pengawasan unit usaha produk hewan;
 - d. Pengawasan produk hewan;



- e. Standardisasi produk hewan;
- f. Sertifikasi registrasi produk hewan;
- g. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan;
- h. Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan;
- i. Pencegahan penularan zoonosis;
- j. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hewan yang ASUH;
- k. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan
- l. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha; dan
- m. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2024 Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner telah menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sasaran kegiatan:

1. Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitari produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan dengan indikator kinerja Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan;
2. Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat dengan indikator kinerja 1) Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong; 2) Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong; dan 3) Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat dengan indikator kinerja Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan;



3. Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat dengan indikator kinerja Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan;
4. Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat dengan indikator kinerja Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan;
5. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak dengan indikator kinerja Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan;
6. Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner;
7. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis dengan indikator kinerja Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis;
8. Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan dengan indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	100	%
2	Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	28,3	%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	53,5	%
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	3,3	%
3	Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	89,5	%
4	Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	96,2	%
5	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	91,94	%
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	95	%
7	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	76	%
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti	100	%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 telah mengalami dua kali revisi. Semula pada Bulan Desember 2023 sebesar Rp.43.382.500.000,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan turun pada Bulan Agustus 2024 menjadi Rp. 3.535.995.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), revisi ke-2 terjadi pada Bulan Desember 2024 menjadi Rp. 4.244.610.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja Direktur Kesmavet Tahun 2024 dan PK Revisi dapat dilihat pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 4.



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring* dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. PENCAPAIAN SASARAN PK TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yaitu (1) rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan; (2) rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong; (3) rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong; (4) rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong; (5) rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan; (6) rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan; (7) persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (8) tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner; (9) persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis; dan (10) rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 diukur berdasarkan capaian kinerja output kegiatan, dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 sebesar **107,55%** dengan **kategori sangat berhasil**. Capaian kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	100	%	100	100	Berhasil
2	Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	28,3	%	43,18	120	Sangat Berhasil
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	53,5	%	90,74	120	Sangat Berhasil
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	3,3	%	23,96	120	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	89,5	%	82,81	93	Berhasil
4	Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	96,2	%	96,88	101	Sangat Berhasil
5	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	91,94	%	90,52	98,46	Berhasil



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Kategori
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	95	%	97,83	103	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	76	%	90,79	120	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	100	%	100	100	Berhasil

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja dengan capaian sangat berhasil yaitu (1) rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong; (2) rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong; (3) rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong; (4) rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan; (5) tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner; dan (6) persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis. Sedangkan 4 indikator kinerja memperoleh capaian berhasil yaitu (1) rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan; (2) rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan; (3) persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; dan (4) rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan capaian 4 (empat) tahun sebelumnya, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja terdapat pada 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian yaitu rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong dan persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis. Perbandingan target dan capaian kinerja Direktorat



Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2020 - 2024 tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	17,5	18,4	22	23,8	28,3	112,57	110,65	120	116	120
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	51,3	51,7	52,4	52,8	53,5	105,85	120	120	120	120
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	1,7	1,7	1,7	2,5	3,3	120	120	120	120	120
3	Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	88,2	88,5	89	89,2	89,5	97	66	102	100	92,5
4	Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	95,2	95,5	95,7	96	96,2	103	105	102	101	100,7
5	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	81,5	85,2	85,5	85,7	91,94	106,3	98,6	110	107,2	98,46
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	85	92	93	95	95	117,6	108,7	100	105	103
7	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	-	74	74,5	75	76	-	118,9	113	107	120
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100



Selain indikator kinerja, keberhasilan indikator kerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner juga ditunjang oleh 4 (empat) indikator kerja (output), dimana terdapat 1 (satu) indikator kerja dengan capaian sangat berhasil yaitu hasil uji keamanan dan mutu produk hewan dan 3 (tiga) indikator kerja dengan capaian berhasil yaitu (1) supervisi, monitoring dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, (2) norma, standar, pedoman dan kriteria kesehatan masyarakat veteriner, dan (3) sarana kesehatan masyarakat veteriner. Capaian sasaran indikator kerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Sasaran Indikator Kerja (output) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Kegiatan	1	100%	Berhasil
2	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	NSPK	6	100%	Berhasil
3	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	2.500	Produk	2.921	116,8%	Sangat Berhasil
4	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	Unit	5	100%	Berhasil
Rata-rata capaian kerja					104,2%	Sangat Berhasil

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1. Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan Dan Non pangan Yang Diterima Negara Tujuan Karena Alasan Mutu Dan Keamanan Produk erhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan salah satu direktorat yang memiliki fungsi memberikan jaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan bagi produk hewan yang dipersyaratkan (ASUH) baik untuk produk hewan yang dimasukkan ke Indonesia maupun yang dikeluarkan ke luar Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan volume ekspor produk hewan dan membuka pasar ekspor ke negara-negara mitra dagang Indonesia, Direktorat Kesehatan



Masyarakat Veteriner menyiapkan unit usaha produk hewan yang memiliki potensi untuk melaksanakan pengeluaran produk hewannya ke luar wilayah Indonesia. Untuk dapat memenuhi persyaratan teknis (sanitary) dari negara tujuan ekspor, maka dilaksanakan harmonisasi persyaratan teknis dengan unit usaha yang memiliki potensi ekspor tersebut. Selain peningkatan volume ekspor produk hewan, tentunya harus ada penambahan negara tujuan ekspor. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa unit usaha produk hewan Indonesia dapat diterima oleh negara-negara selain yang sudah menerima produk Indonesia. Sebagai contoh adalah Singapura yang sudah menerima produk unggas dari Indonesia sejak tahun 2022 dan Malaysia yang sudah menerima produk susu sejak tahun 2023.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi IKSP (%)	0%	0%	0%	0%	100%					

Dalam kegiatan ini, target Capaian Indikator Kinerja Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Non Pangan yang Diterima Negara tujuan Karena Alasan Mutu dan Keamanan Produk Terhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan adalah 0% yang berarti tidak boleh ada penolakan terhadap produk hewan yang diekspor oleh otoritas negara tujuan ekspor. Pada tahun 2024 tidak terdapat produk hewan yang ditolak oleh negara tujuan ekspor sehingga capaiannya adalah 100%.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan tahun 2024 adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 100%, maka capaian indikator kinerja rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan mutu



dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan adalah sebesar 100% dengan kategori berhasil.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (2021-2024)

Capaian indikator kinerja rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) adalah tercapai sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yang juga 100%, maka realisasi yang tercapai adalah 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh eksportir meliputi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan juga persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Produk yang diekspor harus berasal dari unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bentuk penjaminan penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (bagi yang dipersyaratkan). Setiap negara tujuan ekspor memiliki persyaratan umum dan teknis yang harus dipenuhi oleh unit usaha eksportir. Unit usaha ekspor Indonesia telah memiliki persetujuan (*approval*) untuk dapat melakukan ekspor produk hewan ke beberapa negara yang mempersyaratkan proses *approval*, seperti Malaysia dan Singapura. Proses *approval* tersebut melibatkan otoritas negara tujuan dan Direktorat Kesmavet sebagai otoritas veteriner yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Veteriner, sehingga persyaratan teknis yang tercantum dalam Sertifikat Veteriner tersebut sudah sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan telah dipenuhi oleh unit usaha eksportir.



e. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

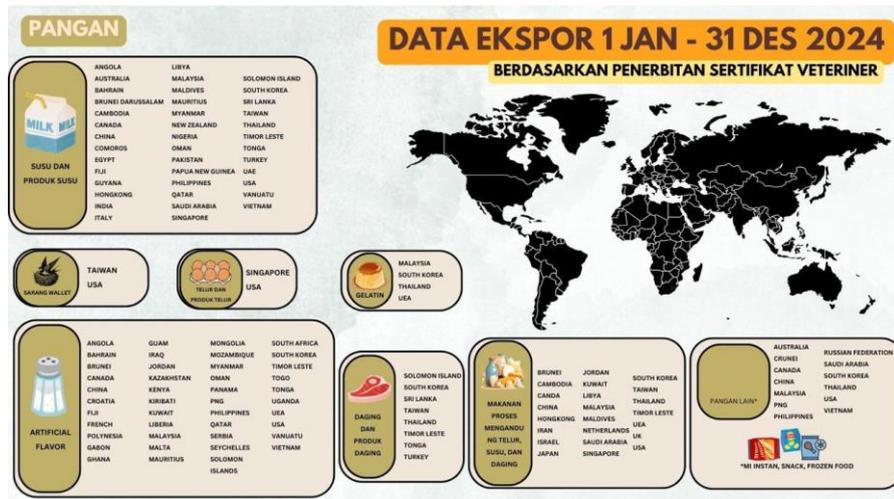
Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan juga Atase Perdagangan di KBRI negara tujuan ekspor. Pembinaan secara terus menerus kepada unit usaha untuk mencapai level sesuai dengan persyaratan teknis dari negara tujuan ekspor merupakan salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan kinerja ini.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan capaian ini pada tahun 2024 antara lain dengan meningkatkan upaya pembinaan secara berkesinambungan terhadap calon unit usaha ekspor. Untuk unit usaha yang sudah melaksanakan ekspor dilakukan pengawasan sehingga produk hewan yang diekspor tetap memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan unit usaha yang memiliki peluang ekspor produk hewan; dan
- 2) Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang telah melakukan ekspor produk hewan sehingga persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor masih dapat dipertahankan.

Berdasarkan sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Direktorat kesmavet pada tahun 2024, ekspor produk pangan asal hewan telah diterima oleh 69 negara. Produk tersebut berupa susu dan produk susu, daging dan produk daging, telur dan produk telur, gelatin dan produk gelatin, sarang burung walet, *artificial flavor*, makanan proses mengandung telur, susu dan daging, serta produk pangan asal hewan lain seperti mie instan, *snack*, *frozen food* dengan volume sebesar 209.250.133 kg dengan nilai 722.563.186 USD. Sedangkan ekspor produk hewan non pangan telah diterima oleh 49 negara dengan volume sebesar 30.602.469 kg dengan nilai 231.252.629 USD. Produk hewan non pangan yang diekspor berupa kulit dan produk kulit, tulang dan produk tulang, bulu dan produk bulu, *guano posphat*, dan produk hewan non pangan lainnya. Data jumlah *Veterinary Health Sertificate* (VHC) yang telah diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2024 tersaji di Lampiran 5.

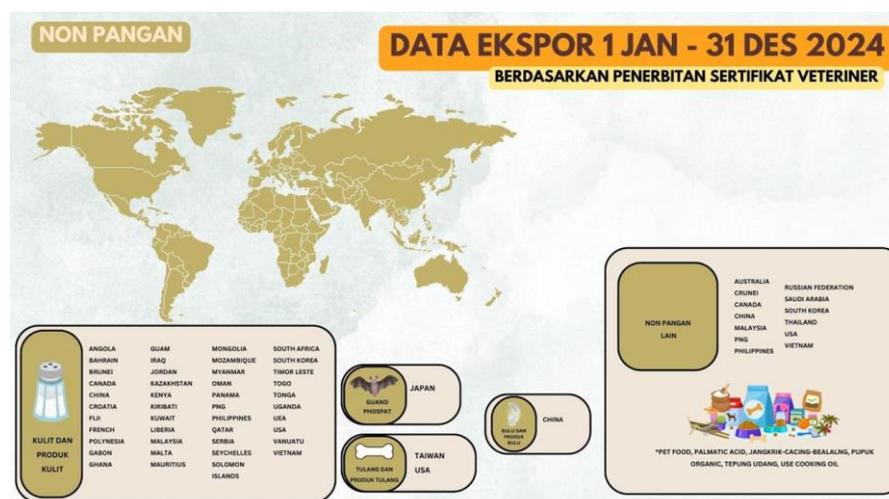




Gambar 3. Data sebaran negara tujuan ekspor produk pangan asal hewan berdasarkan penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024



Gambar 4. Data ekspor produk pangan asal hewan berdasarkan penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024



Gambar 2. Data Sebaran negara tujuan ekspor produk hewan non pangan berdasarkan penerbitan Sertifikat Veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024





Gambar 6. Data ekspor produk hewan non pangan berdasarkan penerbitan sertifikat veteriner 1 Januari – 31 Desember 2024

3.2. RASIO PENJAMINAN DAGING RUMINANSIA YANG AMAN DAN LAYAK DIKONSUMSI TERHADAP TOTAL TERNAK RUMINANSIA YANG DIPOTONG

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Persyaratan teknis yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Nomor Kontrol



Veteriner sebagai bukti penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman, sehat, dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Saat ini jumlah RPH Ruminansia (RPHR) beroperasi yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 504, namun yang telah memiliki NKV sebanyak 180 RPHR, sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan. Rasio daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong tahun 2024 adalah 43,18%. Hal ini berdasarkan perbandingan antara jumlah daging yang dihasilkan oleh RPHR yang memiliki NKV dengan jumlah total daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak ruminansia di seluruh Indonesia. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio daging yang aman, sehat dan bermutu} = \frac{\text{jumlah daging ruminansia RPHR ber - NKV}}{\text{jumlah daging ruminansia di keseluruhan RPHR}} \times 100\%$$

Jumlah daging ruminansia diperoleh dari jumlah ternak yang dipotong dikalikan dengan nilai konversi dari satu ekor ternak menjadi daging. Konversi satu ekor ternak sapi menjadi daging adalah 140,97 kg, sedangkan satu ekor kerbau adalah 129,72 kg. Jumlah pemotongan ternak di RPHR yang sudah memiliki NKV berdasarkan data yang dilaporkan ke iSIKHNAS sebanyak 347.803 ekor sapi dan 2.192 ekor kerbau, sedangkan pemotongan ternak keseluruhan sebanyak 788.420 ekor sapi dan 23.591 ekor kerbau. Sehingga perhitungan rasio daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio daging yang aman,sehat dan bermutu} \\ &= \frac{\text{jumlah daging ruminansia RPHR ber -NKV}}{\text{jumlah daging ruminansia di keseluruhan RPHR}} \times 100\% \\ &= \frac{49.314.135 \text{ kg}}{114.203.792 \text{ kg}} \times 100\% = 43,18\% \end{aligned}$$

Perhitungan jumlah daging ruminansia (sapi dan kerbau) yang dihasilkan dari RPHR yang sudah memiliki NKV dapat dilihat di Tabel 7. Sedangkan Sedangkan perhitungan jumlah daging ruminansia di keseluruhan RPHR dapat dilihat di Tabel 8.



Tabel 7. Jumlah daging ruminansia yang dihasilkan RPHR yang sudah memiliki NKV

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di RPHR ber-NKV			
Jenis hewan	Jumlah Pemotongan (ekor)	Konversi menjadi Daging (kg/ekor)	Jumlah Daging (kg)
Sapi	347.803	140,97	49.029.789
Kerbau	2.192	129,72	284.346
Total			49.314.135

Tabel 8. Jumlah Daging Ruminansia di Seluruh RPHR

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di Seluruh Indonesia			
Jenis hewan	Jumlah Pemotongan	Konversi menjadi Daging	Jumlah Daging
Sapi Lokal	788.420	140,97	111.143.567
Kerbau	23.591	129,72	3.060.225
Total			114.203.792

Data pemotongan sapi dan kerbau di RPHR yang sudah memiliki NKV Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 6 dan data pemotongan ternak ruminansia di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Realisasi 2024 terhadap Realisasi 2023	% Realisasi 2024 terhadap Realisasi 2022	% Realisasi 2024 terhadap Realisasi 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target (%)	17,5	18,4	22,0	23,8	28,3	120	120	120	120	120
Realisasi (%)	19,7	20,36	26,6	27,61	43,18					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong tahun 2024 sebesar 43,18%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 28,3%, maka diperoleh rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong



sebesar 152,58% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2024)

Capaian indikator kinerja rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong tahun 2024 sebesar 43,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 27,61%, maka diperoleh capaian sebesar 156,39%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 26,6%, maka diperoleh capaian sebesar 162,33%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 20,36%, maka diperoleh capaian sebesar 212,08%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong tahun 2024 sebesar 43,18%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 28,3%, maka capaian kinerja saat ini adalah 152,58%.

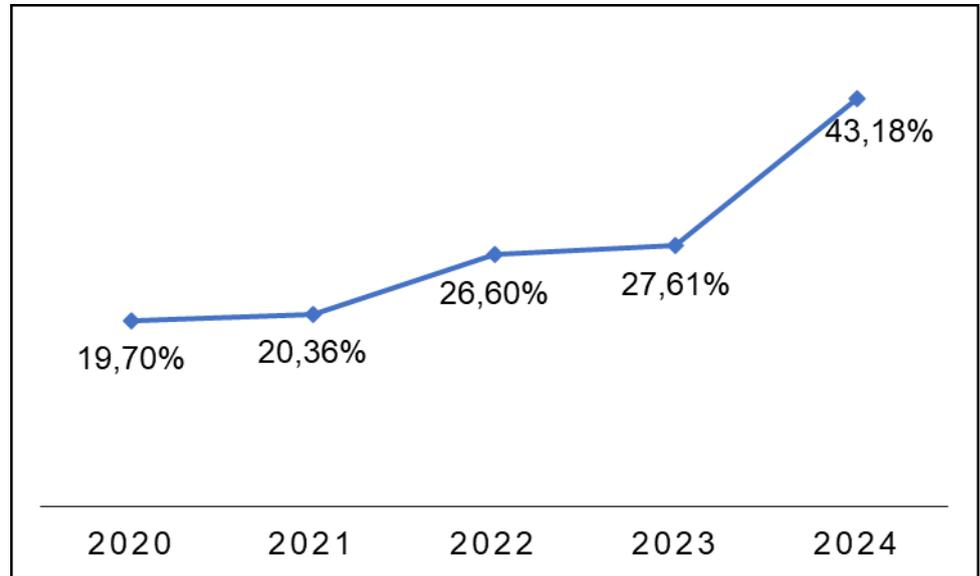
d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. pembinaan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usaha miliknya sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya.

Pada tahun 2023 rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya rumah potong hewan yang sudah memiliki NKV. Perkembangan rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong Tahun 2020-2024.



e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain dengan meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan serta mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi dan pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong rumah potong hewan untuk dapat mendapatkan sertifikasi NKV.

f. Kendala dan Strategi Dalam Pencapaian Kinerja

Sebagian besar kondisi RPH di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan, oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH serta fasilitasi operasionalnya. Direktorat Kesmavet telah berupaya mencari sumber penganggaran lain seperti DAK dan mendorong daerah mengalokasikan APBD untuk memfasilitasi pembangunan atau renovasi Rumah Potong Hewan agar memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan.

3.3. RASIO PENJAMINAN DAGING UNGGAS YANG AMAN DAN LAYAK DIKONSUMSI TERHADAP TOTAL TERNAK UNGGAS YANG DIPOTONG

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya NKV sebagai bukti penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman, sehat, dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Saat ini jumlah RPH Unggas (RPHU) beroperasi yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 289 dan yang telah memiliki NKV sebanyak 225 RPHU sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan. Rasio daging unggas yang sehat, aman dan bermutu dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2024 adalah 90,74%. Hal ini berdasarkan perbandingan antara jumlah daging yang dihasilkan oleh RPHU ber-NKV dengan jumlah total daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak unggas di seluruh Indonesia. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio daging unggas yang aman, sehat dan bermutu} = \frac{\text{jumlah daging unggas RPHU ber - NKV}}{\text{jumlah daging unggas di keseluruhan RPHU}} \times 100\%$$

Jumlah daging unggas diperoleh dari jumlah ternak yang dipotong dikalikan dengan nilai konversi dari satu ekor unggas menjadi daging. Konversi satu ekor unggas menjadi daging adalah 1,1 kg. Jumlah pemotongan ternak di RPHU



yang sudah memiliki NKV berdasarkan data yang dilaporkan ke iSIKHNAS sebanyak 468.933.656 ekor, sedangkan pemotongan ternak keseluruhan sebanyak 516.792.335 ekor unggas. Sehingga perhitungan rasio daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Rasio daging unggas yang aman, sehat dan bermutu} = \\
 & \frac{\text{jumlah daging unggas RPHU ber-NKV}}{\text{jumlah daging unggas di keseluruhan RPHR}} \times 100\% = \\
 & \frac{\text{jumlah ternak unggas yang dipotong di RPHU ber-NKV} \times \text{konfersi menjadi daging}}{\text{jumlah total ternak unggas yang dipotong} \times \text{konfersi menjadi daging}} \times 100\% \\
 & = \frac{468.933.656 \text{ ekor} \times 1,1 \text{ kg}}{516.792.335 \text{ ekor} \times 1,1 \text{ kg}} \times 100\% = 90,74\%
 \end{aligned}$$

Data pemotongan di RPHU yang sudah memiliki NKV Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 8 dan data pemotongan ternak unggas di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 9.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	51,3%	51,7%	52,4%	52,8%	53,5%	120%	106,74%	120%	120%	120%
Realisasi IKSP (%)	54,3%	62,83%	65,96%	85,01%	90,74%					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2024 sebesar 90,74%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2023 sebesar 53,5%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong sebesar 169,61% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2024 sebesar 169,61%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 85,01%, maka diperoleh capaian sebesar 106,74%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 65,96%, maka diperoleh capaian sebesar 137,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 62,83%, maka diperoleh capaian sebesar 144,42%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2024 sebesar 90,74%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 53,5%, maka capaian kinerja saat ini sudah mencapai 169,61%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

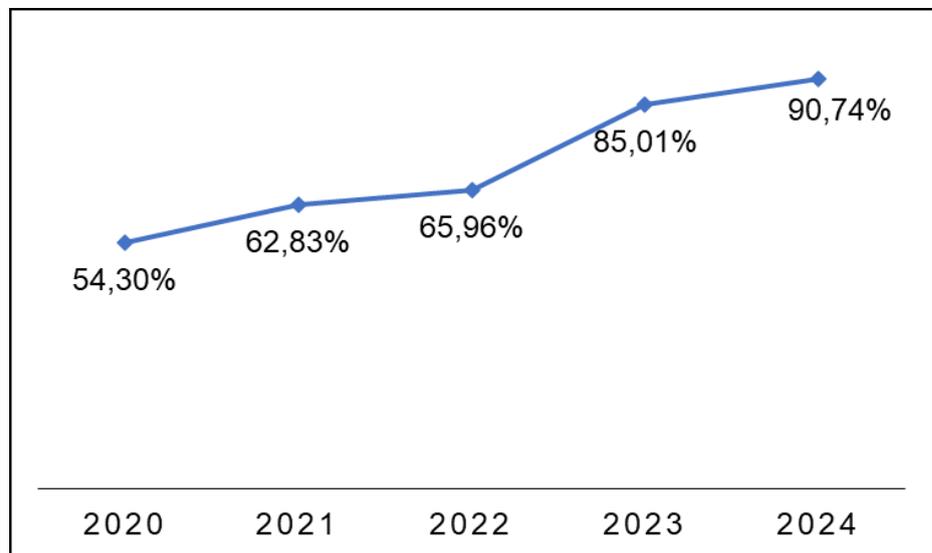
Realisasi rasio daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan sebesar yaitu dari 85,01% pada tahun 2023 menjadi 90,74% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena peningkatan pelaporan data pemotongan unggas melalui iSIKHNAS yang dilaporkan oleh rumah potong hewan unggas swasta yang sudah memiliki NKV untuk memenuhi persyaratan dalam penetapan kuota impor GPS.

Selain itu, keberhasilan kegiatan ini juga tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha poduk hewan. Pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui alokasi kegiatan sertifikasi unit usaha. Kegiatan sertifikasi unit usaha dengan komponen pembinaan persyaratan teknis kesmavet dan pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan telah berhasil meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya.



Pada tahun 2024 rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya rumah potong hewan yang tersertifikasi NKV. Perkembangan rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong Tahun 2020-2024.



e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain dengan meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan serta mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong rumah potong hewan untuk dapat mendapatkan sertifikasi NKV.

f. Kendala dan Strategi Dalam Pencapaian Kinerja

Capaian rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong tahun 2024 mencapai 90,74% dimana capaian ini lebih banyak dihasilkan dari RPHU Swasta jika dibandingkan dengan RPHU Pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian



besar kondisi RPHU Swasta yang sudah memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan jika dibandingkan dengan RPHU Pemerintah. Oleh karena itu, perlu penataan RPHU pemerintah melalui renovasi ataupun rehabilitasi RPH serta fasilitasi operasionalnya. Direktorat Kesmavet telah berupaya mencari sumber penganggaran lain seperti DAK dan mendorong daerah mengalokasikan APBD untuk memfasilitasi pembangunan atau renovasi RPH agar memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan. Selain itu, Direktorat Kesmavet juga terus mendorong RPHU baik swasta maupun pemerintah yang belum melaporkan data pemotongannya untuk melaporkan data pemotongan melalui iSIKHNAS.

3.4. RASIO PENJAMINAN DAGING BABI YANG AMAN DAN LAYAK DIKONSUMSI TERHADAP TOTAL TERNAK BABI YANG DIPOTONG

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang aman dan layak untuk dikonsumsi maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya NKV sebagai bukti penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman, sehat, dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Saat ini jumlah RPH Babi (RPHB) yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 56, namun yang telah memiliki NKV baru 8 RPHB sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet



dan kesrawan. Rasio daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong tahun 2024 adalah 23,96%. Hal ini berdasarkan perbandingan antara jumlah daging yang dihasilkan oleh RPHB yang sudah memiliki NKV dengan jumlah total daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak babi di seluruh Indonesia. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah ternak babi yang dipotong di RPHB ber - NKV} \times \text{konversi menjadi daging}}{\text{jumlah total ternak babi yang dipotong} \times \text{konversi menjadi daging}} \times 100\%$$

Jumlah daging babi diperoleh dari jumlah ternak yang dipotong dikalikan dengan nilai konversi dari satu ekor babi menjadi daging. Konversi satu ekor babi menjadi daging adalah 45,18 kg. Jumlah pemotongan ternak di RPHB yang sudah memiliki NKV berdasarkan data yang dilaporkan ke iSIKHNAS sebanyak 86.975 ekor, sedangkan pemotongan ternak keseluruhan sebanyak 363.002 ekor babi. Sehingga perhitungan rasio daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio daging yang aman, sehat dan bermutu} &= \\ &= \frac{\text{jumlah daging babi di RPHB ber-NKV}}{\text{jumlah daging babi di keseluruhan RPHB}} \times 100\% = \\ &= \frac{\text{jumlah ternak babi yang dipotong di RPHB ber-NKV} \times \text{konversi menjadi daging}}{\text{jumlah total ternak babi yang dipotong} \times \text{konversi menjadi daging}} \times 100\% \\ &= \frac{86.975 \text{ ekor} \times 45,18 \text{ kg}}{363002 \text{ ekor} \times 45,18 \text{ kg}} \times 100\% = 23,96\% \end{aligned}$$

Data pemotongan di RPHB ber NKV Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 10 dan data pemotongan ternak babi di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 11.



Tabel 11. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	1,7%	1,7%	1,7%	2,5%	3,3%	120%	120%	120%	120%	120%
Realisasi IKSP (%)	3,4%	3,3%	7,93 %	7,58 %	23,96%					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong tahun 2024 sebesar 23,96%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 3,3%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong sebesar 726,06% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 5 (lima) Tahun Terakhir (Tahun 2020-2023)

Capaian Indikator Kinerja rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong tahun 2024 sebesar 23,96%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 7,58%, maka diperoleh capaian sebesar 316,09%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 7,93%, maka diperoleh capaian sebesar 302,14%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 3,3%, maka diperoleh capaian sebesar 726,06%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong tahun 2024 sebesar 23,96%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3,3%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 726,06%.

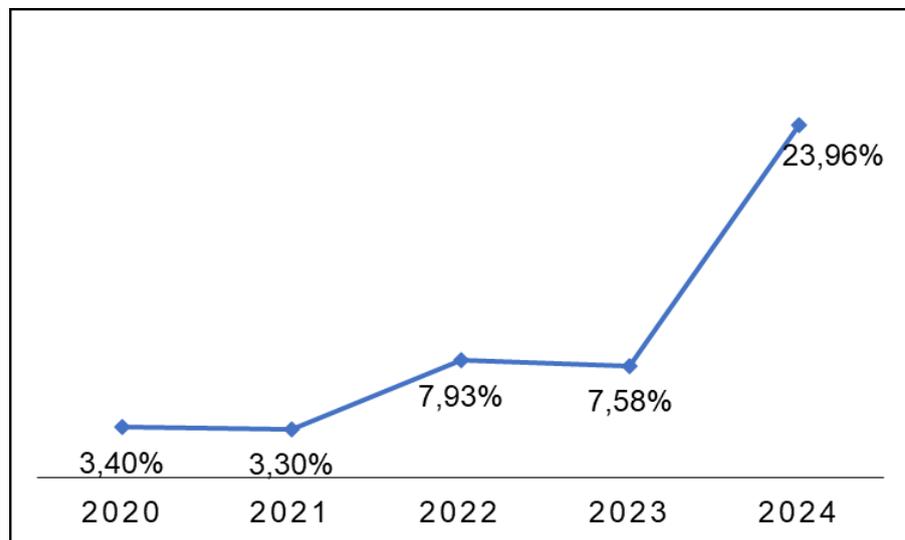


d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui alokasi kegiatan sertifikasi unit usaha. kegiatan sertifikasi unit usaha dengan komponen pembinaan persyaratan teknis kesmavet dan pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan telah berhasil meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya.

Pada tahun 2024 rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya rumah potong hewan yang tersertifikasi NKV. Perkembangan rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3. Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong Tahun 2020-2024.



e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain dengan meningkatkan upaya pembinaan



penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada rumah potong hewan serta mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani yang aman dan layak dikonsumsi sekaligus mendorong rumah potong hewan untuk dapat mendapatkan sertifikasi NKV.

f. Kendala dan Strategi Dalam Pencapaian Kinerja

Sebagian besar kondisi RPH di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan, oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH serta fasilitasi operasionalnya. Direktorat Kesmavet telah berupaya mencari sumber penganggaran lain seperti DAK dan mendorong daerah mengalokasikan APBD untuk memfasilitasi pembangunan atau renovasi RPH agar memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan.

3.5. RASIO PRODUK SUSU YANG BERSTATUS SEHAT, AMAN DAN BERMUTU TERHADAP TOTAL PRODUK SUSU YANG DIHASILKAN

Perhitungan indikator dilakukan melalui analisa sampel layanan pengujian keamanan produk susu pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh Unit Pelaksana Teknis/UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT termasuk untuk produk susu, sehingga perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian.

Sampel diterima dari unit usaha budidaya ternak pernah (peternak), tempat penampungan susu (koperasi susu) dan unit pengolahan susu. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Data sampel susu yang telah diuji dapat dilihat pada Lampiran 12.



Cara perhitungan rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sampel produk susu segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu}}{\text{Jumlah sampel produk susu segar keseluruhan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan mencapai 82,81% dari target 89,5% sehingga diperoleh capaian sebesar 92,53%.

Tabel 12. Target Tahun 2020-2024 dan Realisasi Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	88,2 %	88,5 %	89%	89,2 %	89,5 %	92,53%	92,53%	90,71%	140,19%	92,53%
Realisasi IKSP (%)	85,2 %	58%	91%	89,2 %	82,81%					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 82,81%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 89,5%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan sebesar 92,53% dengan kategori “Berhasil”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 92,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar



100%, maka diperoleh capaian sebesar 92,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 102%, maka diperoleh capaian sebesar 90,71%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 66%, maka diperoleh capaian sebesar 140,19%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi rasio produk susu yang berstatus sehat pada tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 6,39% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 89,2%. Hal ini dikarenakan perhitungan hanya berdasarkan sampel pasif yang dikirimkan ke Laboratorium Kesmavet UPT, sehingga target unit usaha tidak terpetakan dan tergantung dari unit usaha yang mengujikan produk susu ke laboratorium. Meskipun demikian, capaian rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan sebesar 92,53 masih masuk dalam kategori berhasil karena masih masuk dalam rentang 80 – 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja rasio produk susu yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 82,81%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 89,5%, maka capaian kinerja saat ini sudah mencapai 92,53%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, diantaranya produk susu maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan.

Pada tahun 2024, rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan mencapai 82,81% dari target 89,5% sehingga diperoleh capaian sebesar 92,53%. Keberhasilan ini dikarenakannya upaya pembinaan yang terus menerus dilakukan serta sertifikasi NKV pada unit usaha. Upaya untuk meningkatkan kualitas produk susu dalam negeri menjadi komitmen bersama antara pemerintah, swasta/pelaku usaha, koperasi, asosiasi dan stakeholder terkait lainnya.



Selain itu pada Tahun 2024, juga sudah diimplementasikan pengawasan lalu lintas produk hewan dalam wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Permentan 17 Tahun 2023 melalui aplikasi iSIKHNAS. Lalu lintas produk hewan mempersyaratkan diantaranya produk hewan harus berasal dari unit usaha memiliki NKV atau dalam pembinaan dan produk hewan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk parameter cemaran mikroba dan residu yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran lalu lintas produk hewan tentunya akan mendorong unit usaha untuk melakukan sertifikasi NKV serta memastikan produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilalulintaskan.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk susu yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk susu yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/ kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

f. Upaya tindak lanjut di tahun 2025

Adapun upaya tindak lanjut di tahun 2025 untuk meningkatkan produk susu yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu lain:

- 1) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan penerapan cara yang baik di unit usaha produk susu meliputi unit usaha budidaya sapi perah dan tempat penampungan susu.
- 2) Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT dan UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk susu;



- 3) Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha (IPS) dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV.
- 4) Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis, terkait dengan penjaminan keamanan produk susu yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.

3.6. RASIO PRODUK TELUR YANG BERSTATUS SEHAT, AMAN DAN BERMUTU TERHADAP TOTAL PRODUK TELUR YANG DIHASILKAN

Perhitungan indikator dilakukan melalui analisa sampel layanan pengujian keamanan produk telur pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT termasuk untuk produk telur, sehingga perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian.

Sampel diterima dari unit usaha budidaya unggas petelur dan unit usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam rangka penjaminan keamanan produk telur yang berstatus sehat, maka untuk memenuhi persyaratan keamanan produk telur yang akan dikonsumsi harus dipastikan produk telur harus berasal dari telur yang sehat. Jumlah dan asal sampel telur tersaji pada Lampiran 12.

Cara perhitungan rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan diperoleh dengan rumus berikut:



$$\frac{\text{Jumlah sampel produk telur yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu}}{\text{Jumlah sampel produk telur keseluruhan}} \times 100\%$$

Tabel 13. Target Tahun 2020-2024 dan Realisasi Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	95,2 %	95,5 %	95,7 %	96%	96,2 %	100,71%	99,98%	102,40%	96,18%	100,71%
Realisasi IKSP (%)	98%	100 %	98%	96,7 %	96,88%					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 96,88%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 96,2%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan sebesar 100,71% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 100,71%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 100,73%, maka diperoleh capaian sebesar 99,98%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 102,40%, maka diperoleh capaian sebesar 98,34%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 104,71%, maka diperoleh capaian sebesar 96,18%.

Pada tahun 2024, realisasi rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap



total produk telur yang dihasilkan mencapai 96,88% dari target 96,2% sehingga dapat diperoleh capaian sebesar 100,71%. Rasio produk telur yang berstatus sehat pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan 0,18% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 96,7%.

Peningkatan ini dapat terjadi dengan usaha dari berbagai sektor baik dari Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan ke unit usaha dalam peningkatan higiene sanitasinya. Capaian rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan masih melebihi target 2024. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, upaya pembinaan dan sosialisasi terkait penerapan cara yang baik perlu dilaksanakan secara terus menerus.

Realisasi Indikator Kinerja rasio rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan tahun 2023 sebesar 96,70%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 96,20%, maka capaian kinerja saat ini sudah mencapai 100,52%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja rasio rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 96,88%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 96,20%, maka capaian kinerja saat ini sudah mencapai 100,71%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, diantaranya produk telur maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan.

Pada tahun 2024, rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap total produk telur yang dihasilkan mencapai 96,88% dari target 96,2% sehingga dapat diperoleh capaian sebesar 100,71%. Keberhasilan ini dikarenakan upaya pembinaan yang terus menerus dilakukan serta sertifikasi NKV pada unit usaha. Upaya untuk meningkatkan kualitas produk



telur dalam negeri menjadi komitmen bersama antara pemerintah, swasta/pelaku usaha, koperasi, asosiasi dan *stakeholder* terkait lainnya.

Selain itu pada Tahun 2024, juga sudah diimplementasikan pengawasan lalu lintas produk hewan dalam wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Permentan 17 Tahun 2023 melalui aplikasi iSIKHNAS. Lalu lintas produk hewan mempersyaratkan diantaranya produk hewan harus berasal dari unit usaha yang memiliki NKV atau dalam pembinaan dan produk hewan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk parameter cemaran mikroba dan residu yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran lalu lintas produk hewan tentunya akan mendorong unit usaha untuk melakukan sertifikasi NKV serta memastikan produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilalu lintaskan.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk susu yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk susu yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/ kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

g. Upaya tindak lanjut di tahun 2025

Adapun upaya tindak lanjut di tahun 2025 untuk meningkatkan produk telur yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu lain:

- 1) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan



penerapan cara yang baik di unit usaha produk telur meliputi unit usaha budidaya unggas petelur dan tempat pengumpulan, pelabelan, pengemasan telur konsumsi.

- 2) Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT dan UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk telur;
- 3) Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha (IPS) dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV dan registrasi produk telur.
- 4) Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis, terkait dengan penjaminan keamanan produk telur yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.

3.7. PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL HEWAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

Perhitungan indikator dilakukan melalui analisa sampel layanan pengujian kewanan pangan segar asal hewan pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT, sehingga perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian. Kemudian dari sampel yang diuji tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategori yang digunakan untuk mengukur persentase keamanan pangan segar asal hewan

Cara perhitungan jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan yang berdasarkan hasil perhitungan rata-rata seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu menunjukkan hasil di bawah ambang batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) atau negatif terhadap jumlah sampel keseluruhan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk



hewan di seluruh wilayah Indonesia yang dikoleksi dari unit usaha produk

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan}}{\text{Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan}} \right) \times 100\%$$

hewan secara sampling memenuhi kaidah keilmuan mewakili populasi seluruh unit usaha produk hewan yang teregistrasi dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator kinerja persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan tahun 2024 sebesar 90,52%. Angka ini didapat dari perhitungan persentase jumlah sampel produk pangan segar asal hewan (daging, susu dan telur) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dari 25.424 total sampel produk pangan segar asal hewan yang diuji oleh laboratorium UPT. Sampel tersebut berasal dari unit usaha budidaya unggas petelur, budidaya ternak perah, rumah potong hewan, cold storage, kios daging, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), dan tempat penampungan susu. Data pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, serta rincian sampel per UPT dan Wilayah Kerja selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Hasil perhitungan realisasi capaian IKU peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	81,50	85,2	85,50	85,70	91,94	98,45	97,92	95,25	98,46	95,28
Realisasi IKSP (%)	86,60	84,0	94,00	91,90	90,52	%	%	%	%	%



a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 90,52%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 91,94%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan sebesar 98,46% dengan kategori “Berhasil”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2024 sebesar 98,46%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 107%, maka diperoleh capaian sebesar 92,02%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 110%, maka diperoleh capaian sebesar 89,51%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 97%, maka diperoleh capaian sebesar 101,51%.

Penurunan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 disebabkan oleh unit usaha sumber sampel yang tidak dapat ditentukan, karena hanya berdasarkan sampel uji yang masuk ke UPT.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2024 sebesar 90,52%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,94%, maka realisasi kinerja saat ini sudah mencapai 98,46%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada Tahun 2024 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023, dan belum mencapai target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan sampel yang diuji merupakan sampel pasif yang dikirimkan oleh unit usaha untuk dilakukan layanan pengujian di UPT. Belum optimalnya penerapan cara yang baik pada unit usaha produk hewan yang belum memiliki NKV dapat berdampak



pada keamanan dan mutu produk hewan yang dihasilkan. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024



e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Selain itu pada Tahun 2024, juga sudah diimplementasikan pengawasan lalu lintas produk hewan dalam wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Permentan 17 Tahun 2023 melalui aplikasi iSIKHNAS. Lalu lintas produk



hewan mempersyaratkan diantaranya produk hewan harus berasal dari unit usaha berNKV atau dalam pembinaan dan produk hewan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk parameter cemaran mikroba dan residu yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran lalu lintas produk hewan tentunya akan mendorong unit usaha untuk melakukan sertifikasi NKV serta memastikan produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilalulintaskan.

f. Upaya tindak lanjut di tahun 2025

Adapun upaya-upaya tindak lanjut di tahun 2025 antara lain:

- 1) Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan atau berdasarkan laporan hasil pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan secara rutin oleh pelaku usaha
- 2) Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
- 3) Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT dan UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan;
- 4) Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan
- 5) Meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.
- 6) Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis, terkait dengan penjaminan keamanan produk hewan yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.



3.8. TINGKAT KEMANFAATAN SARANA PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner Tahun 2024 dihitung dengan melihat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2023. Tingkat kemanfaatan dihitung dengan menggunakan kuesioner.

Sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2024 antara lain fasilitasi sarana RPHR di Kabupaten Depok dan Kabupaten Gowa, fasilitasi unit penanganan madu di Kabupaten Sumbawa Barat, fasilitasi sarana penanganan kesejahteraan hewan uji di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dan Balai Besar Pusat Veteriner Fatrma Pusvetma, dan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana Tahun 2024 sebesar 97,83%. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Uraian	Lokasi	Volume	Satuan	% Pemanfaatan
Fasilitasi RPHR Kota Depok	Kota Depok, Jawa Barat	1	Unit	100,00%
Fasilitasi RPHR Kab. Gowa	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Unit Penanganan Madu	Kab. Sumbawa Barat, NTB	1	Unit	87,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBPMSOH	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	PUSVETMA	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet	BPMSPH Bogor	1	Unit	100,00%
Rata-rata				97,83%



Hasil kuisisioner terhadap tingkat kemanfaatan sarana prasana kesmavet terdapat pada Lampiran 13.

Tabel 16. Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	85	92	93	95	95	103%	96,67%	103,57%	96,67%	101,75%
Realisasi IKSP (%)	100	100	93,33	100	97,83					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2024 sebesar 97,83%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 103% atau masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2024 sebesar 103%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 105,26%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 96,66%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 101,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 101,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 118%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 86,22%.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2023 sebesar 103%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 95,00%, maka realisasi indikator kinerja sasaran program ini mencapai 108,9%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner pada tahun 2024 dihitung berdasarkan persentase pemanfaatan sarana prasarana yang difasilitasi pada tahun 2023. Pada Tahun 2023 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menganggarkan Fasilitasi Sarana RPHR melalui APBN pada dua RPHR yaitu RPHR Tapos Kota Depok Jawa Barat dan RPHR Tamarunang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pengadaan sarana RPHR di RPHR Tapos Kota Depok Tahun 2023 berupa peralatan alat perebahan (*restraining box*) dan *skinning cradle stainless* dengan anggaran sebesar Rp. 608.000.000. Pengadaan sarana RPH-R di RPH-R Tamarunang berupa *railing system, hoist, spreader, hidrolik hook cutter, carcass hook* (penggantung karkas), *brisket saw* (gergaji tulang dada), *dehider, knife sterilizer, bone saw, vaccum pack machine, shrink tank, stapping band machine, rak blasting daging, ABF, genset, pisau, asahan pisau dan tempat pisau, kipas angin dan AC* dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000. Sarana RPH yang diberikan tahun 2023 dapat dimanfaatkan pada tahun 2024 yang dinilai dari pemotongan hewan di RPH yang mendapatkan fasilitasi bantuan sarana dari pemerintah pusat tersebut yaitu RPHR Tapos Kota Depok dan RPHR Tamarunang Kabupaten Gowa. Dengan adanya pemotongan hewan di RPH-R tersebut menandakan bahwa sarana yang diberikan dimanfaatkan dengan baik sehingga Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet di RPHR Tapos dan RPHR Gowa adalah 100%.

Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji di Laboratorium Pusvetma dan BBPMSOH yang menggunakan fasilitas hewan coba. Pada Pusvetma Sarana prasarana hewan laboratorium yang diadakan pada tahun 2023 berupa *animal*



insulator. Insulator hewan ini berfungsi untuk mengatur kelembaban dan suhu di dalam ruangan tempat pemeliharaan hewan laboratorium. Melalui pengaturan suhu dan kelembapan yang optimal maka akan membuat hewan laboratorium nyaman dan produktif. Pada BBPMSOH Sarana prasarana hewan laboratorium yang diadakan pada tahun 2023 berupa rak stainless steel untuk kandang hewan percobaan. Adapun fasilitas laboratorium kesmavet tersebut juga telah dimanfaatkan pada tahun 2023 hingga sekarang. Pemanfaatan sarana yang difasilitasi oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner di BBPMSOH, dalam penggunaannya dilakukan setiap hari dengan kapasitas dapat menampung hewan coba laboratorium sebanyak 1200 ekor dengan rincian 6 rak yang masing-masing rak berisi 10 kandang dan 1 kandang berisi 10 ekor.

Pemanfaatan sarana yang di fasilitasi oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner di Pusvetma, penggunaan Animal Insulator dengan kapasitas tersebut mencakup 1 ruangan tempat pemeliharaan hewan laboratorium. Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di BPMSPH Bogor, untuk fasilitasi peralatan laboratorium kesmavet. Adapun fasilitas laboratorium kesmavet tersebut juga telah dimanfaatkan pada tahun 2023 hingga sekarang.

Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di BPMSPH Bogor berupa *biosafety cabinet*, *realtime PCR*, *waterbath shaker* untuk mendukung layanan pengujian dengan metode *Real Time PCR* (qPCR) dan PC Bioinformatika untuk keperluan analisis genomik/*genotyping* sebagaimana Tabel 17.

Tabel 157. Pemanfaatan Fasilitas Sarana Laboratorium Kesmavet BPMSPH Bogor Tahun 2023

No	Nama Peralatan	Fungsi Peralatan	Parameter Uji
1	Bisafety Cabinet	Proses Ekstraksi DNA dari sampel/ccontoh menggunakan BSC untuk mencegah kontaminasi silang dan melindungi personel dari risiko zoonosis	Campylobacter spp. qPCR
			E. coli O157 qPCR
			Identifikasi Spesies (Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies (Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies (Babi) qPCR



No	Nama Peralatan	Fungsi Peralatan	Parameter Uji
			Identifikasi Spesies (Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Tikus) qPCR
			Influenza A qRT-PCR
			PMK qRT-PCR
			ASF qPCR
			Salmonella spp. qPCR
2	Realtime PCR	Deteksi/identifikasi DNA/RNA tertarget	Campylobacter spp. qPCR
			E. coli O157 qPCR
			Identifikasi Spesies (Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies (Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies (Babi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Tikus) qPCR
			Influenza A qRT-PCR
			PMK qRT-PCR
			ASF qPCR
			Salmonella spp. qPCR
3	Waterbath Shaker	Proses preparasi/ekstraksi sampel/ccontoh terutama asal sampel dari fragmen kecil seperti sarang burung walet, gelatin dsb sebelum analisis menggunakan instrumen utama seperti HPLC, PCR dll	Residu hormon MGA
			Identifikasi Spesies (Ayam) qPCR
			Identifikasi Spesies (Babi) ELISA
			Identifikasi Spesies (Babi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Sapi) qPCR
			Identifikasi Spesies (Tikus) qPCR
4	PC Bioinformatika	Analisis bioinformatika untuk keperluan analisis genomik/ genotyping seperti AMR, metagenomik dsb.	Sequencing sebagai kelanjutan AST



Adapun fasilitasi laboratorium kesmavet tersebut juga telah dimanfaatkan pada tahun 2023 hingga sekarang. Pada tahun 2024, telah dilakukan Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) oleh BPMSPH Bogor sebanyak 856 sampel sebagaimana Tabel 18.

Tabel 168. Jumlah Sampel Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR) di BPMSPH Bogor Tahun 2024

Layanan Pengujian Real Time PCR (qPCR)	Jumlah Sampel
Campylobacter spp.	20
E. coli O157	48
Identifikasi Spesies Babi	6
Identifikasi Spesies Domba	3
Identifikasi Spesies Kambing	3
Identifikasi Spesies Sapi	3
Salmonella Enteritidis	401
Salmonella spp.	364
Salmonella Typhimurium	8
Jumlah	856

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana unit usaha madu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tahun 2023, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi madu yang memenuhi standar keamanan pangan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan teknis NKV dan registrasi produk hewan. Pembangunan sarana ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana unit usaha madu telah mencapai 87%. Capaian ini mencerminkan peningkatan penggunaan fasilitas yang telah disediakan, termasuk bangunan, alat produksi, dan fasilitas penunjang lainnya.

Rincian pemanfaat bangunan unit usaha madu berdasarkan kuesioner telah digunakan oleh kelompok usaha madu "Harapan Keluarga" di Dusun Montong Singgan, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Pembagian bangunan mencakup ruang proses penerimaan bahan baku, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan dan *display* produk madu.



Dampak positif yang didapat dari pemanfaat prasaran dan sarana unit usaha madu antara lain peningkatan produksi madu sebesar 10%. Diharapkan kedepan akan ada peningkatan yang lebih signifikan. Kurangnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan beberapa sarana dan prasarana belum selesai dibangun secara menyeluruh. Disparitas harga prasaran dan sarana saat realisasi pembangunan menyebabkan kebutuhan material dan penyelesaian bangunan tidak terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut berupa pengadaan tambahan anggaran untuk penyelesaian bangunan dan peralatan produksi untuk mendukung pemenuhan persyaratan teknis keamanan produk madu masih perlu dilakukan. Penambahan alokasi anggaran untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana yang belum selesai seperti lantai yang belum di epoksi, dinding dan langit-langit yang belum dicat.

Dengan tingkat pemanfaatan mencapai 87%, sarana dan prasarana unit usaha madu diharapkan terus dapat ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya peningkatan produksi dan pemenuhan persyaratan teknis dalam rangka surveilan NKV dan registrasi produk hewan.

3.9. PERSENTASE WILAYAH YANG TERKENDALI DARI ZONOSIS

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas.



Penentuan zoonosis prioritas yang perlu ditangani dan dikendalikan dilakukan menggunakan *One Health Zoonotic Disease Prioritization Tool (OHZDP) Tool*, seperti dijelaskan oleh *Rist et al. (2014)*. Metode ini memadukan pendekatan kualitatif dan semikuantitatif dengan melibatkan partisipan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, perguruan tinggi, serta komisi ahli kesehatan hewan.

Kriteria yang dipilih dalam proses ranking prioritas zoonosis terdiri dari :

- a) Case fatality rate dan mortalitas pada manusia di Indonesia
- b) Kemampuan pengendalian dan pencegahan penyakit
- c) Proporsi penyakit pada manusia akibat paparan hewan
- d) Beban penyakit hewan
- e) Adanya kolaborasi intersektoral

Dalam pertemuan OHZDP disepakati 6 (enam) zoonosis prioritas utama lintas Kementerian untuk dicegah dan dikendalikan yaitu:

- a) Virus Zoonosis Influenza (flu burung dan babi)
- b) Zoonosis Coronavirus (COVID-19, Middle East Respiratory Syndrome (MERS),
- c) Anthrax,
- d) Rabies,
- e) Zoonotik Tuberkulosis
- f) Leptospirosis

Berdasarkan urgensi dan keterkaitan anggaran, ditetapkan rabies dan antraks menjadi prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis adalah persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis. Wilayah terkendali adalah provinsi yang tidak terjadi kasus pada manusia atau mengalami penurunan kasus zoonosis.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis dilihat dari status wilayah terhadap kasus penyakit Rabies dan Anthrax pada tahun 2024 dibandingkan dengan kasus penyakit Rabies dan



Anthrax di tahun 2023. Cara penghitungannya yaitu jumlah provinsi yang terkendali dibagi jumlah seluruh provinsi dikalikan 100%, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah provinsi yang terkendali zoonosis}}{\text{Jumlah total provinsi di Indonesia}} \times 100\%$$

Capaian sementara wilayah terkendali kasus Rabies di Tahun 2024 adalah 34 provinsi dibagi 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 89,47% dan capaian sementara wilayah terkendali kasus Anthrax di Tahun 2024 adalah 37 provinsi dibagi 38 provinsi dikalikan 100% yaitu sebesar 97,37%. Untuk capaian indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis pada tahun 2024 adalah rata-rata penjumlahan dari capaian wilayah terkendali kasus Rabies dan Antraks tahun 2024 yaitu sebesar 93,42%.. Data Status Wilayah terhadap Kasus Penyakit Rabies dan Anthrax Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase wilayah yang terkendali zoonosis dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	74,0	74,5	75,0	76,0	120	112,14	112,52	100,91	120
Realisasi IKSP (%)	-	88,0	83,83	80,26	90,79					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis pada tahun 2024 adalah 93,42%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 76,00%, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis sebesar 120% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* Tahun 2024 sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 107%, maka diperoleh capaian sebesar 112%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 112%, maka diperoleh capaian sebesar 107%. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 119%, maka diperoleh capaian sebesar 100,8% Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 karena IKU Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2021.

Penurunan realisasi 2021 hingga 2023 merupakan dampak dari kejadian PMK dan LSD tahun 2022 sehingga hampir semua alokasi anggaran maupun SDM lebih dikerahkan utk pengendalian kedua penyakit tersebut, akhirnya pada tahun 2023 banyak HPR yang blm sempat tervaksin.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali *Zoonosis* tahun 2024 sebesar 93%. Apabila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2024 sebesar 76%, maka saat ini sudah mencapai 120%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi pencegahan penularan zoonosis dilakukan melalui koordinasi intens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan zoonosis. Ditjen PKH melalui Fungsi Direktorat Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target pada populasi masyarakat di daerah endemis atau risiko tinggi tertular zoonosis. Selain itu mengingat rabies merupakan salah satu zoonosis yang memiliki kasus cukup tinggi di Indonesia, maka dilakukan pembentukan kader siaga rabies (Kasira) serta peningkatan kompetensi kader sebagai salah satu upaya pelibatan masyarakat



dalam pencegahan dan penularan rabies.

- 2) Pencegahan penularan zoonosis dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di RPH. Pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* berperan dalam mendeteksi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis dalam rangka mendukung kegiatan surveilans di RPH.

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas, yang dua diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yaitu Rabies dan Antraks. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat strategi melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Penilaian Risiko Bersama

Penilaian risiko bersama ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antar kementerian dan pemangku kebijakan terkait yang bertanggungjawab dalam aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Pelibatan ahli lintas sektor dan berbagi informasi akan menghasilkan penilaian risiko bersama dalam penanggulangan *zoonosis* dalam hal pilihan manajemen dan komunikasi risiko terhadap ancaman *zoonosis*.

- 2) Pemeriksaan kesehatan hewan (*ante mortem*/AM) dan pemeriksaan kesehatan jeroan serta karkas (*post mortem*/PM)

Pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan jeroan serta daging, berperan penting dari pemantauan *zoonosis* dan penyakit hewan menular, karena sebagian besar hewan ternak dipotong di RPH. Pemeriksaan AMPM merupakan elemen yang signifikan dalam rantai pangan asal hewan, sehingga data klinis, patologi, kontaminasi kimia dapat tersedia dan terukur. Pemeriksaan ini juga berkontribusi dalam deteksi dini *hazard* (bahaya) yang berdampak pada kesehatan manusia, maupun kesehatan dan kesejahteraan hewan.



3) Pemetaan Zoonosis

Pemetaan zoonosis dalam menjamin keamanan pangan untuk memahami konsentrasi bahaya (*hazard*) pada tahapan rantai pangan asal hewan yang berdampak pada risiko kesehatan manusia. Bahaya pada pemetaan ini meliputi *Zoonotik-Tuberculosis* (zTB) yang disebabkan oleh *Mycobacterium Bovis* melalui pengujian sampel susu sapi di peternakan dan lesi pada organ (paru), limfonodus (mediastinalis, mammary submadibula, intestinal ada perkejuan), extrapulmonary (hati, limpa) yang diambil di RPH. serta Toksoplasmosis yang disebabkan oleh *Toxoplasma gondii* pada kambing melalui pengujian sampel susu di peternakan dan organ jantung yang diambil di RPH.

4) Pembentukan Kader Siaga Rabies (Kasira)

Sebagai upaya mendorong pembebasan Rabies berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Kesmavet Ditjen PKH menginisiasi pembentukan Kasira di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Kasira diharapkan mempercepat pelaporan kasus dan respon, meningkatkan cakupan vaksinasi anjing, memperluas penyebaran informasi serta meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat dalam pengendalian Rabies, serta mampu meningkatkan sinergitas Puskesmas, Puskesmas dan instansi terkait dalam meningkatkan motivasi dan komitmen kader serta mendorong implementasi *One Health* sehingga pengendalian Rabies dapat dilaksanakan secara efektif. Pada tahun mendatang Kasira diharapkan dapat direplikasi di wilayah-wilayah endemis dan berisiko tinggi di Indonesia.

5) Komunikasi Risiko

Pencegahan dan pengurangan risiko zoonosis dapat dilakukan melalui komunikasi risiko dalam bentuk advokasi kepada pemangku kepentingan dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi



(KIE) kepada masyarakat tentang risiko zoonosis, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sasaran utama advokasi adalah pemerintah daerah dan instansi terkait sedangkan sasaran utama KIE adalah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

f. Kendala yang dihadapi beserta langkah antisipatif yang akan diambil

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM dan anggaran serta jumlah tenaga ahli yang terbatas, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk pelaksanaan edukasi.

g. Langkah-Langkah Antisipatif yang Akan Diambil

Langkah antisipatif yang diambil berupa memaksimalkan pemanfaatan anggaran melalui kolaborasi dengan mitra, seperti FAO dan USAID.

3.10. RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KESEJAHTERAAN HEWAN YANG DIMANFAATKAN

Salah satu Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan yaitu penerapan kesejahteraan hewan. Penerapan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi rasa bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Prinsip kebebasan Hewan diterapkan pada kegiatan:

- a. penangkapan dan penanganan;
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan;
- e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
- f. pengangkutan;
- g. pemotongan dan pembunuhan;
- h. praktik kedokteran perbandingan; dan
- i. layanan Kesehatan Hewan.



Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan hewan perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan penerapan standar teknis dan tindak penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan. Pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan pengukuran terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan. Antara sasaran kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pengukuran capaian ini, baru dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, sasaran kegiatan dan indikator terkait dengan kesejahteraan hewan belum ada dan masih bergabung dengan sasaran kegiatan lainnya.

$$\left(\frac{\text{Jumlah Unit Penanganan Hewan Usaha Yang Memenuhi Persyaratan Penerapan Kesejahteraan Hewan}}{\text{Jumlah Unit Penanganan Hewan yang telah diawasi, diadvokasi dan edukasi}} \right) \times 100\%$$

Pertimbangan pemilihan unit usaha berdasarkan aksesibilitas dan keterbatasan anggaran. Capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan tahun 2024 sebesar 100%. Angka ini didapat dari perhitungan persentase jumlah unit penanganan hewan yang memenuhi persyaratan penerapan kesejahteraan hewan dari 8 unit usaha/penanganan hewan RPHR sebanyak 6 unit dan 2 unit usaha Budidaya unggas petelur dengan jumlah unit penanganan hewan yang telah diawasi, diadvokasi dan edukasi untuk menerapkan kesejahteraan hewan. Unit usaha, yang meliputi budidaya unggas petelur, rumah potong hewan. Unit penanganan hewan yang memenuhi Persyaratan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Tabel 20.

Hasil perhitungan realisasi capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan dapat dilihat pada Tabel 21.



Tabel 20. Unit penanganan hewan yang memenuhi Persyaratan Penerapan Kesejahteraan Hewan

No	Nama Unit Usaha	Lokasi	Jumlah Unit Penanganan	Persentase
1	RPH R Bubulak	Kota Bogor, Jawa Barat	1	100%
2	RPH R Cibinong	Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1	100%
3	RPH R Tapos	Kota Depok, Jawa Barat	1	100%
4	RPH R Cirebon	Kota Cirebon, Jawa Barat	1	100%
5	RPH R Parigi	Ciputat, Tangsel Banten	1	100%
6	RPH U PT. Sreeya Sewu	Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1	100%
7	RPH U Jambu Raya	Kota Bogor, Jawa Barat	1	100%
8	CV. Telur Ayam Bahagia	Sleman, DIY	1	100%
9	PT. Inti Prima Sejahtera	Sukabumi, Jawa Barat	1	100%

Tabel 21. Capaian Indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Dimanfaatkan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2024	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2023	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2022	% Capaian 2024 terhadap Capaian 2021	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
Realisasi IKSP (%)	-	-	-	-	100%					

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada Tabel 21 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, sasaran kegiatan dan indikator terkait dengan kesejahteraan hewan belum ada, maka diperoleh capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023).



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 3 (tiga) Tahun Terakhir (Tahun 2021-2023)

Capaian Indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan Tahun 2024 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021-2023 tidak dapat dibandingkan, karena indikator capaian ini baru pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan Tahun 2024 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021-2023 tidak dapat dibandingkan, karena indikator capaian ini baru pada tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan

Strategi dari upaya penerapan kesejahteraan hewan di unit penanganan hewan antara lain:

- 1) Mendukung Iklim usaha peternakan yang kondusif;
Fasilitasi ekspor, NKV, mendukung penerapan *Good Animal Husbandry Practice* (GAHP) ASEAN
- 2) Merespon isu publik (Kesejahteraan Hewan);
Isu publik perdagangan daging anjing, penganiayaan hewan, KAP Survei, dan lain-lain
- 3) *Publik awareness*;
Bersama masyarakat, LSM, anak sekolah, peternak, Perguruan tinggi, dan lain-lain
- 4) Penyiapan fasilitas;
Penyelenggaraan fasilitas yang mendukung dibidang peternakan (Unit Pelayanan Teknis pemerintah), kapal ternak, sarana hewan lab, fasilitasi *shelter* kebencanaan, dan lain-lain
- 5) Regulasi
Menyusun regulasi/panduan- panduan kesejahteraan hewan
- 6) Pengawasan/pembinaan serta advokasi terkait Kesejahteraan Hewan



Pengawasan/pembinaan kesejahteraan hewan pada unit usaha, peternak, shelter hewan, tempat pemeliharaan hewan, RPH, dan lain-lain

e. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), NGO dan stakeholder lain dalam mendukung penerapan Kesejahteraan Hewan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang dan memperkuat pencapaian antara lain:

1) Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Regulasi yang lebih komprehensif dan Penetapan Standar Nasional Kesejahteraan Hewan

2) Penguatan Advokasi dan Edukasi

Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu :

- a) Edukasi Kesejahteraan Hewan di Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Banten;
- b) Edukasi Kesejahteraan Hewan di Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bekasi
- c) Edukasi kesejahteraan hewan pada mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH)-UGM secara periodik
- d) Advokasi dan edukasi pada pelaksanaan kegiatan ayam tangkas di Depok
- e) Webinar Laporan Benchmark Bebas Sangkar (Cage Free) Asia
- f) Kegiatan FGD dengan Animal Friends Jogja (AFJ) terkait peternakan ayam dan itik
- g) Diskusi terpumpun dengan YLKI terkait kesejahteraan hewan pada ternak produksi
- h) Diskusi Persiapan Rencana FGD Tingkat Nasional Klirens Etik Pemeliharaan dan Penggunaan Hewan Laboratorium dengan BRIN

3) Kolaborasi dari berbagai komponen

- a) Kegiatan kolaborasi implementasi kesejahteraan hewan pada lembaga konservasi dengan Kementerian Kehutanan



- b) Kegiatan seminar focal point kesejahteraan hewan dengan World Organization for Animal Health (WOAH)
- c) Kolaborasi dengan NGO kesejahteraan hewan
- d) Keterlibatan dalam *World Rabies Day* melalui kegiatan *Workshop NTT World Rabies Day & Animal Welfare* Tahun 2024 di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
- e) Keterlibatan dalam *The 3rd Animal Welfare Conference – Indonesia*. Konferensi internasional kesejahteraan hewan di Jakarta.

f. Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam advokasi dan edukasi kesejahteraan hewan adalah:

- 1) Ketersediaan regulasi teknis yang mendukung belum secara lengkap tersedia
- 2) Kesadaran petugas, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan
- 3) Komitmen dan supporting pembiayaan yang minim untuk kegiatan kesejahteraan hewan

g. Langkah-Langkah Antisipatif yang Akan Diambil

Alternatif solusi dalam melaksanakan kegiatan advokasi dan edukasi kesejahteraan hewan adalah

- 1) Memasukkan muatan kesejahteraan hewan dalam kurikulum pendidikan nasional
- 2) Membangun jejaring yang seluas—luasnya dengan seluruh pihak yang sejalan dengan tujuan pemerintah
- 3) Menyediakan platform-platform yang mengikuti perkembangan jaman
- 4) Mencontoh negara lain yang telah menerapkan kesejahteraan hewan dengan baik.



D. CAPAIAN RINCIAN OUTPUT KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Capaian Rincian Output (RO) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, pengeluaran produk hewan ke Luar wilayah negara Republik Indonesia harus disertai dengan Sertifikat Veteriner (Veterinary Health Certificate/VHC) yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Kesmavet dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Pemenuhan persyaratan teknis sanitari pengeluaran (ekspor) produk unggas telah dilakukan ke unit usaha yang akan melakukan ekspor ke Singapura, diantaranya PT Jangkar Nusantara Megah, PT Raja Jeva Nisi, dan PT Sreya Sewu.

Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pengajuan permohonan rencana kebutuhan daging lembu Tahun 2024 dan implementasi rencana pengajuan permohonan rencana kebutuhan daging lembu Tahun 2025 sesuai dengan proses bisnis di Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner bersama Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pembina unit usaha produk hewan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan pada pelaku usaha yang telah mendapatkan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan Daging Lembu Tahun 2024 dan/atau pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan rencana kebutuhan daging lembu Tahun 2025 melalui SINAS NK. Verifikasi persyaratan teknis pemasukan karkas daging jeroan dan olahannya dilakukan pada:

- a. PT Bigan Mulia Perkasa
- b. PT Servium



- c. PT Satu Dunia
- d. PT Indonesia Air Water
- e. PT Segar Baru Abadi
- f. PT Exosia Agro Bersaudara
- g. PT Makmur Asri Jaya Utama
- h. PT Kongkie Malindo Jaya
- i. PT Sumber Berkat Kharisma
- j. PT Macroprima Pangan Utama
- k. PT Ago Tiga Berkat
- l. PT Berkat Restu Orang Tua
- m. PT Bersama Boga Perkasa

Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional. Produk Hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI harus berasal dari negara dan unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian dengan melalui tahapan analisa risiko yaitu *desk review*, *onsite inspection* dan evaluasi risiko.

Pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan (*desk review*) pada Tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 4 kali, (1) tanggal 2 -3 Mei 2024 di Bogor terhadap 10 Aplikasi Unit Usaha, dan 1 Dokumen tambahan Negara dan 17 Dokumen tambahan Unit Usaha, (2) tanggal 5-6 Juni di Bogor terhadap 2 dokumen Negara dan 13 Aplikasi Unit Usaha, (3) tanggal 8-10 Juli 2024 di Lampung terhadap 1 Aplikasi Negara, 16 Aplikasi Unit Usaha, dan 4 Dokumen tambahan unit usaha, dan (4) tanggal 22-23 Oktober 2024 di Jakarta terhadap 2 Dokumen Negara tambahan dan 23 dokumen tambahan unit usaha.

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan *onsite inspection* pemasukan produk pangan asal hewan di 17 unit usaha rumah potong hewan ruminansia (RPHR) dan rumah potong hewan babi (RPHB) yang ada di 3 (tiga) negara, yaitu *onsite inspection* terhadap 3 (tiga) unit usaha RPHR di Negara Australia, *onsite inspection* terhadap 2 (dua) unit usaha RPHB di Negara Denmark, dan *onsite inspection* terhadap 12 (dua belas) unit usaha RPHB di Negara Spanyol.



Pada Tahun 2024, juga telah dilaksanakan evaluasi hasil *onsite inspection* dalam rangka persetujuan unit usaha asal pemasukan produk hewan terhadap 2 unit usaha gelatin dan 1 unit usaha makanan hewan kesayangan dari Turki, dan 7 unit usaha daging dan produk olahannya dari Amerika Serikat.

2. NORMA, STANDAR, PEDOMAN DAN KRITERIA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Target NSPK Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 sebanyak 6 dokumen, dan terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu NSPK Substansi Pengawasan Keamanan Produk Hewan, NSPK Substansi Sanitari dan Standardisasi, NSPK Substansi Higiene Sanitasi dan Penerapan, NSPK Substansi Kesejahteraan Hewan, NSPK Substansi Zoonosis, dan NSPK Pengendalian Pemotongan Betina Produktif, dengan rincian dokumen sebagaimana Lampiran 15.

Realisasi capaian target Tahun 2024 terhadap realisasi capaian target Tahun 2024 sama yaitu sebanyak 6 dokumen, namun ada penambahan pada capaian masing-masing rincian dokumen NSPK yang telah disusun.

3. HASIL UJI KEAMANAN DAN MUTU PRODUK HEWAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 58 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Amanat tersebut lebih lanjut lagi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan terkait dengan pengawasan unit usaha, pengawasan produk hewan, dan pemeriksaan serta pengujian produk hewan dalam rangka penjaminan produk hewan

Pada tahun 2024, anggaran untuk pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan hanya dialokasikan di BPMSPH Bogor untuk pelayanan pengujian sampel pasif yang dikirimkan ke UPT. Adapun realisasi sampel BPMSPH



tahun 2024 adalah 2.921 produk dari target 2.500 produk (capaian 116,84%). Rincian sampel tersaji pada Lampiran 19.

4. SARANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat yang mengkonsumsi produk hewan, pelaksanaan pengujian keamanan produk hewan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pengujian keamanan produk hewan, telah dialokasikan anggaran untuk fasilitasi sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Target dan realisasi sarana dan prasarana kesmavet dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Target dan Realisasi Sarana dan Prasarana Kesmavet

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik
	Sarana Kesmavet	5	5	100,00%
1	BPMSPH	5	5	100,00%
	JUMLAH	5	5	100,00%

Tahun 2024, dialokasikan fasilitasi sarana kesehatan masyarakat veteriner berupa sarana laboratorium kesmavet di BPMSPH sebanyak 5 unit. Sarana tersebut meliputi:

- a. Pengadaan Smart TV Pelayanan Publik sebanyak 1 unit;
- b. Pengadaan AC Split 2 PK untuk lab Kesmavet 1 unit;
- c. Pengadaan Kursi Roda 1 unit;
- d. Pengadaan Sarana Penunjang Monitoring Pengawasan Cemaran dan Residu Obat sebanyak 1 unit; dan
- e. Pengadaan Sarana dan Administrasi Digital (Desktop) sebanyak 1 unit.



E. REALISASI ANGGARAN

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran nasional sebesar Rp 4.244.610.000,- dengan realisasi anggaran keseluruhannya sebesar Rp 4.190.081.982,- atau sebesar 98,72% sebagaimana pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No	KRO	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	% serapan
1.	1786AEA - Koordinasi	1.500.000.000	1.480.211.347	98,62
2.	1786AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.500.000.000	1.478.315.592	98,55
3.	1786QJA - Penyidikan dan Pengujian Produk	656.771.000	645.033.875	98,21
4.	1786.RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	587.839.000	586.521.168	99,78

Sumber: Kelompok Substansi Keuangan dan Perlengkapan, 2025.

Realisasi anggaran berdasarkan indikator dalam perjanjian kinerja sebagaimana pada Tabel 24.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	1.659.867.000	1.641.846.538	98,91%
2	Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	400.751.000	382.723.326	95,50%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	122.021.500	121.459.074	99,54%
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	122.021.500	121.459.074	99,54%
3	Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	148.101.500	146.951.993	99,22%
4	Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	148.101.500	146.951.993	99,22%
5	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	656.771.000	645.033.875	98,21%
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	587.839.000	586.521.168	99,78%
7	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	201.430.000	200.819.336	99,70%
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	197.706.000	196.315.605	99,30%
			4.244.610.000	4.190.081.982	98,72%

Nilai Efisiensi sebesar **36,96%** untuk Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat veteriner. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan sangat efisien. Nilai Efisiensi didapatkan dari perhitungan " $NE=50%+(E/20 \times 50)$ " dimana NE adalah Nilai Efisiensi, dan E adalah efisiensi. Nilai Efisiensi yang



didapat menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan sangat efisien. Adapun Nilai Efisiensi (NE) anggaran Direktorat Kesmavet dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Nilai Efisiensi Anggaran Direktorat Kesmavet Tahun 2024

No.	Sub Output	FISIK			KEUANGAN		$\frac{CRO \times KRO}{G \cdot CRO^{\frac{1}{n}}}$	(AAKRO x CRO) - RAKRO
		TVRO	RVRO	$\frac{CRO}{RVRO} / TVRO$	<u>AAKRO:</u> Alokasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output	<u>RAKRO:</u> Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output		
1.	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	100%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.480.211.347	1.455.849.835	1.215.849.835
2.	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	6	100%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.424.641.000,00	240.782.599	240.782.599
3.	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	2.500	2.	119,87%	656.771.000	Rp 645.033.875	220.419	220.419
4.	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	5	100%	587.839.000	Rp 4586.521.168	117.304.234	117.304.234



Jumlah Total	Rp4.244.610.000	Rp4.190.081.982	Rp1.814.157.087	Rp1.574.157.087
Efisiensi Total $E = \frac{\sum ((AAKRO \times (\prod CRO)^{\Lambda(\frac{1}{n})}) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$	36,96%			
Nilai Efisiensi Total $NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$	36,96%			



IV. PENUTUP

Dari uraian Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pada BAB III, dapat disimpulkan secara umum hasil pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner pada tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan rencana. Capaian kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilaksanakan dengan kriteria “Sangat Berhasil” yaitu sebesar 103% dengan nilai efisiensi 36,96%

Perbaikan yang akan dicapai di masa yang akan datang berupa perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH serta fasilitasi operasionalnya. Direktorat Kesmavet telah berupaya mencari sumber penganggaran lain seperti DAK dan mendorong daerah mengalokasikan APBDnya untuk memfasilitasi pembangunan atau renovasi Rumah Potong Hewan agar memenuhi persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan; meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk susu yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya; memaksimalkan pemanfaatan anggaran melalui kolaborasi dengan mitra; dan memasukkan muatan kesejahteraan hewan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024 dibuat sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesmavet sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan ke depan.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	PNS/PPP	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si	197608262003122001	IV/c	S3	P	PNS	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	drh. Hastho Yulianto, MM	196507312000031001	IV/b	S2	L	PNS	Ketua Kelompok Kesejahteraan hewan
3	drh. Ira Firgorita	196712131999032001	IV/b	S2	P	PNS	Ketua Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan
4	drh. Apriyani Lestariningsih	196604221994032001	IV/c	S2	P	PNS	Ketua Kelompok Higiene, Sanitasi dan Penerapan
5	drh. Eko Susanto, M.Si	197710282006041001	IV/a	S2	L	PNS	Ketua Kelompok Sanitari, Sertifikasi dan Registrasi
6	drh. Shinta Dewi	197712052003122002	IV/a	S2	P	PNS	Ketua Kelompok Zoonosis
7	drh. Armin Riandi	197807302003121004	IV/b	S2	L	PNS	Ketua Tim Kerja Penerapan Kesejahteraan Hewan
8	drh. Agus Jaelani, M.Si	198201122008011007	IV/a	S2	L	PNS	Ketua Tim Kerja Penanggulangan Zoonosis
9	drh. Gunawan Setiaji, M.Sc	198204062008011009	IV/a	S2	L	PNS	Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
10	drh. Eka Handayani, M.Si	198511252010012024	IV/a	S2	P	PNS	Ketua Tim Kerja Pengawasan Peredaran
11	drh. Herwinarni	196504231993032001	IV/b	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
12	drh. Vitasari Safitri, M.Si	197211232000032003	IV/b	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
13	drh. Aji Barbora Niasono, M.Si	198006012009011013	IV/a	S2	L	PNS	Medik Veteriner Madya
14	drh. Anis Trisna Fitrianti, M.Si	198108112008012009	IV/a	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
15	drh. Fety Nurachmawati	198103092009122003	IV/a	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
16	drh. Devi Yanti Sari, M.Si	198112032008012014	IV/a	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
17	drh. Nuraina	197707012011032001	III/d	S2	P	PNS	Medik Veteriner Madya
18	drh. Puguh Wahyudi, M.Si	198102142008011009	IV/a	S2	L	PNS	Ketua Tim Kerja Advokasi Kesejahteraan Hewan
19	drh. Dwi Sari Yuni Lismawati	197706262002122003	IV/a	S2	P	PNS	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Penilaian
20	drh. Nuraini Triwijayanti	197909212005012001	IV/a	S2	P	PNS	Ketua Tim Kerja Pengawasan Unit Usaha dan Surveilans
21	drh. Septa Walyani, M.Si	198109122009122004	IV/a	S2	P	PNS	Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Registrasi
22	drh. Christ Tamboss, M.Si	197812182009121002	IV/a	S2	L	PNS	Ketua Tim Kerja Higiene dan Sanitasi
23	drh. Nila Sari Rahayu, M.Si	198410292009122007	III/d	S2	P	PNS	Ketua Tim Kerja Sanitari
24	drh. Diah Nurhayati, M.Si	198205192008012009	III/d	S2	P	PNS	Kepala Subbagian Tata Usaha
25	drh. Rinin Rohmawati, M.Si	199205142018012002	III/c	S2	P	PNS	Medik Veteriner Muda
26	drh. Cut Desna Apriana, M.Si	198712192015032002	III/d	S2	P	PNS	Medik Veteriner Muda
27	drh. Andi Eka Putra, M.Si	198902222015031001	III/d	S2	L	PNS	Medik Veteriner Muda
28	drh. Risky Aprillian	199104182018011001	III/c	S2	L	PNS	Medik Veteriner Muda
29	drh. Yadi Cahyadi Sutanto, M.Sc	198107252006041002	III/d	S2	L	PNS	Penelaah Teknis Kebijakan
30	drh. Jerry Birowo	198607282018011001	III/b	S2	L	PNS	Medik Veteriner Muda
31	drh. Luthfi Nur Amalina	199111262018012001	III/c	S2	P	PNS	Medik Veteriner Pertama
32	drh. Eric Setyo Nugroho	199303212019021002	III/b	S2	L	PNS	Medik Veteriner Pertama
33	drh. Dyah Wijayanti	198902122020122003	III/b	S2	P	PNS	Medik Veteriner Pertama
34	drh. Andrio	199008192020121003	III/b	S2	L	PNS	Medik Veteriner Pertama
35	drh. Jayanti Chista Aditama	198801152022032001	III/b	S2	P	PNS	Medik Veteriner Pertama



36	Wirdanila, Spt	198209272003122002	III/b	S1	P	PNS	Paramedik Veteriner Mahir
37	Desy Sulistiyowati, A.Md	199312232020122004	II/c	D3	P	PNS	Pranata SDM Aparatur Terampil
38	drh. Ciptadi Arif Wicaksono	199610032023211013	X	S2	L	PPPK	Medik Veteriner Pertama
39	drh. Dwi Fajriatiningrum	199706162023212027	X	S2	P	PPPK	Medik Veteriner Pertama
40	drh. Mu'in Assidiq	198612022024211003	X	S2	L	PPPK	Medik Veteriner Pertama
41	drh. Sarah Karunia Nurtria	199501182024212017	X	S2	P	PPPK	Medik Veteriner Pertama
42	Iyus Parlan, S.Pd, M.Si	196910271997031002	IV/a	S2	L	PNS	Penelaah Teknis Kebijakan
43	Andi Mutia Setiani Kartika, S.T	199304042019022002	III/b	S1	P	PNS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
44	Sumiah	196809281994032001	III/b	SMA	P	PNS	Pengolah Data dan Informasi
45	Yudhi Suseno	197507292008121001	II/d	SMA	L	PNS	Pengolah Data dan Informasi
46	Rachmawati	-	-	SMA	P	HONORER	Pramubakti
47	Alfa Akmal A, S.Kom	-	-	S1	L	HONORER	Pramubakti
48	Yuli Rahayu Astuti	-	-	SMA	P	HONORER	Pramubakti



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 Gedung C, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815780, 7827466, 7815380-84 Psw. 4840, 4836 Fax. (021) 7827466
E-mail : ditjennak@pertanian.co.id
Website : <http://www.dirjenak.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif

Jabatan : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nasrullah

Jakarta, Desember 2023

Pihak Pertama,

Syamsul Ma'arif



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dannon pangan yang diterima negara tujuan	Rasio ekspor produk hewan pangan dan nonpangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	100 %
2	Meningkatnya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	28,3 %
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	53,5 %
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	3,3 %
3	Meningkatnya produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	89,5 %
4	Meningkatnya produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	96,2 %
5	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	86 %
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	95 %
7	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	76 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran

Rp 43.382.500.000,-

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,



Nasrullah

Jakarta, Desember 2023

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,



Syamsul Ma'arif



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
Tahun 2024 Revisi-1



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 Gedung C, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815780, 7827466, 7815380-84 Psw. 4840, 4836 Fax. (021) 7827466
E-mail : ditjennak@pertanian.co.id
Website : <http://www.dirjenak.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryani Zainudin

Jabatan : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Pihak Pertama,

Nuryani Zainudin

Pihak Kedua,

Agung Suganda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Persyaratan Sanitary Produk Hewan Pangan dan Non Pangan yang Diterima Negara Tujuan	Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Nonpangan yang Diterima Negara Tujuan karena Telah Memenuhi Persyaratan Kesehatan, Keamanan dan Mutu Produk Terhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan	100 %
2	Meningkatnya Daging Yang Sehat, Aman Dan Bermutu Untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Penjaminan Daging Ruminansia yang Sehat, Aman dan Bermutu terhadap Total Ternak Ruminansia yang Dipotong	28,3 %
		Rasio Penjaminan Daging Unggas yang Sehat, Aman dan Bermutu terhadap Total Ternak Unggas yang Dipotong	53,5 %
		Rasio Penjaminan Daging Babi yang Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Ternak Babi yang Dipotong	3,3 %
3	Meningkatnya Produk Susu yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Produk Susu yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Produk Susu yang Dihasilkan	89,5 %
4	Meningkatnya Produk Telur yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Produk Telur yang Berstatus Sehat, Aman, dan Bermutu Terhadap Total Produk Telur yang Dihasilkan	96.2 %
5	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Asal Ternak	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	86 %
6	Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	95 %
7	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	76 %
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran

Rp 3.535.995.000,-

Jakarta, Agustus 2024

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,


Agung Suganda

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,


Nuryani Zainudin



Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
Tahun 2024 Revisi-2



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail: ditjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryani Zainudin

Jabatan : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama,

Nuryani Zainudin

Pihak Kedua,

Agung Suganda



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Persyaratan Sanitary Produk Hewan Pangan dan Non Pangan yang Diterima Negara Tujuan	Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Nonpangan yang Diterima Negara Tujuan karena Telah Memenuhi Persyaratan Kesehatan, Keamanan dan Mutu Produk Terhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan	100 %
2	Meningkatnya Daging Yang Sehat, Aman Dan Bermutu Untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Penjaminan Daging Ruminansia yang Sehat, Aman dan Bermutu terhadap Total Ternak Ruminansia yang Dipotong	28,3 %
		Rasio Penjaminan Daging Unggas yang Sehat, Aman dan Bermutu terhadap Total Ternak Unggas yang Dipotong	53,5 %
		Rasio Penjaminan Daging Babi yang Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Ternak Babi yang Dipotong	3.3 %
3	Meningkatnya Produk Susu yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Produk Susu yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Produk Susu yang Dihasilkan	89,5 %
4	Meningkatnya Produk Telur yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio Produk Telur yang Berstatus Sehat, Aman, dan Bermutu Terhadap Total Produk Telur yang Dihasilkan	96.2 %
5	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Asal Ternak	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	91,94 %
6	Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	95 %
7	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	76 %
8	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	100 %



Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran

Rp 4.244.610.000,-

Jakarta, Desember 2024

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan,



Agung Suganda †

Direktur Kesehatan Masyarakat
Veteriner,



Nuryani Zainudin



Lampiran 5. Data jumlah VHC (Veterinary Health Certificate) yang telah diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2024

No	Negara Tujuan	Jumlah Sertifikat / Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angola	1			4	6
2.	Australia	97	104	45	36	46
3.	Austria		1			
4.	Bahrain	2	3	1	5	5
5.	Bangladesh		2	2	1	2
6.	Brunei Darussalam	26	25	58	193	119
7.	Barbados					
8.	Cambodia	36	52	58	63	50
9.	Canada	105	53	268	82	154
10.	China	181	179	122	427	434
11.	Comoros				1	
12.	Croatia	7	1		1	
13.	Denmark	1				
14.	Dominican Republic					1
15.	Egypt	1	4	2	2	10
16.	East Timor					7
17.	Equatorial Guinea		1	2		
18.	Fiji	24	29	21	26	32
19.	France	8	2	3		
20.	French Polynesia			2	5	10
21.	Gabon	1		1	2	4
22.	Germany	26	29	1		
23.	Ghana				1	2
24.	Guam	1	5	1	2	2
25.	Guatemala	1				
26.	Greece					1
27.	Guyana	2			3	1
28.	Hong Kong	69	59	63	59	42
29.	Hungary			1		
30.	India	71	137	202	296	305



31.	Iran	1			1	
32.	Iraq	4	1	5	143	116
33.	Israel				1	1
34.	Italy	21	10	1	1	1
35.	Ivory Coast (Cote D'Ivoire)			7		1
36.	Japan	39	43	47	31	32
37.	Jordan	7	8	10	146	182
38.	Kazakhstan				1	1
39.	Kenya			1	2	6
40.	Kiribati	1	2		4	2
41.	Kuwait	8	4	5	7	15
42.	Liberia	4	1		3	
43.	Latvia					3
44.	Libya	8	2		5	2
45.	Lithuania		5	1		
46.	Malaysia	403	445	442	964	1.266
47.	Maldives	19	20	25	31	19
48.	Malta	37	31	18	19	17
49.	Mauritania					2
50.	Mauritius	15	12	8	16	19
51.	Mongolia				3	12
52.	Mexico					6
53.	Mozambique				2	
54.	Myanmar	14	6	14	17	2
55.	Namibia					5
56.	Nauru	1				
57.	Netherlands	1	3	2	3	4
58.	New Caledonia					5
59.	New Zealand	40	29	19	3	6
60.	Nigeria			1	2	5
61.	Oman	8	11	1	20	9
62.	Pakistan	32	50	30	31	26
63.	Panama				2	



64.	Papua New Guinea	250	242	258	459	447
65.	Philippines	173	157	286	394	773
66.	Poland				1	
67.	Qatar	4	10	5	17	17
68.	Romania				1	2
69.	Russian Federation				1	
70.	Samoa	1				
71.	Saudi Arabia	16	29	15	8	35
72.	Senegal					6
73.	Serbia				11	18
74.	Seychelles				1	
75.	Singapore	18	22	124	223	376
76.	Solomon Islands	11	11	20	79	84
77.	South Africa		1	10	179	305
78.	South Korea	102	93	93	121	114
79.	Spain	8	2		1	
80.	Sri Lanka	25	37	25	38	43
81.	Suriname					2
82.	Taiwan	25	28	20	19	41
83.	Tanzania	1				
84.	Thailand	149	121	145	169	200
85.	Timor Leste	97	89	95	106	94
86.	Togo	4	1		1	
87.	Tonga	4	2	2	21	28
88.	Turkey	3	2	1	7	2
89.	Uganda				1	
90.	United Arab Emirates	15	14	12	70	162
91.	United Kingdom	2	2	3	2	
92.	United States of America	1.269	1.233	1.064	970	1.457
93.	Vanuatu		2	2	11	7
94.	Venezuela	2	2			
95.	Vietnam	158	179	183	458	707
	Grand Total	3.660	3.648	3.853	6.036	7.918



Lampiran 6. Data Pemotongan RPHR ber-NKV Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten>Nama RPH	Bulan												Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aceh													
Kota Banda Aceh													
RPH Kota Banda Aceh				30	101	280	70	99	181	286	443	422	1912
RPH-R Keudah Banda Aceh	93	81	372	287									833
Kota Langsa													
RPH-R Langsa Barat	43	56	233	202	63	122	23	40	52	60	50	41	985
Bali													
Badung													
RPH-R Kab. Badung	24	21	34	26	26	26	26	42	27	38	23	33	346
Kota Denpasar													
RPH-R Kota Denpasar	414	103	213	44									774
Bangka Belitung													
Bangka Tengah													
RPH Bangka Tengah	23	21	30	35	15	30	26						180
Belitung Timur													
RPH-R Manggar										6	1	5	12
Banten													
Kota Cilegon													
Rumah Potong Hewan Ruminansia Kota Cilegon	193	120	284	119	174	225	175	149	188	129	182	204	2142
Kota Serang													
RPH-R Kota Serang	337	392	505	527	368	510	357	344	365	384	357	377	4823
Kota Tangerang													
RPH-R Bayur	1139	1024	1493	1879	1110	1365	1140	1058	1464	1788	1717	1689	16866
Lebak													
RPH-R Rangkasbitung	1												1
Pandeglang													
RPH Pandeglang	86	84	88	238	102	81	96	90	92	85	82	84	1208
Serang													
RPH-R Santori Wabin Jayatama	459	500	702	340	449	425	509	370	520	517	510	553	5854
Bengkulu													
Mukomuko													
RPH-R Padang Penaik	61	59	114	109	66	73	69	64					615
Di Yogyakarta													
Bantul													
RPH-R Segoroyoso										112	125	109	346
Kota Yogyakarta													
RPH-R Giwangan	65	56	57	119	54	6	30	47	45	44	45	68	636
Sleman													
RPH-R Mancasan										41			41



Dki Jakarta													
Kota Jakarta Timur													
RPH-R CAKUNG	2156	2333	3220	3818	2345	2007	1541	3001	2161	780		3677	27039
Jambi													
Bungo													
Rumah Potong Hewan Kab. Bungo				91	99	61	62	95	102	81	97	117	805
Kota Jambi													
RPH-R Kota Jambi	35	33	6				14	26		6	30	5	155
Kota Sungai Penuh													
RPH-R Sungai Penuh							38	44	43	5	5	5	140
Merangin													
RPH-R Pulau Rayo	91	64	152	116	93	96	76	125	50	209	132	141	1345
Muaro Jambi													
RPH-R Sungai Bahar	16	13	15	13	7		11	8	15	14	15	16	143
Jawa Barat													
Bandung													
RPH-R Pemerintah Meat Business Centre (MBC)							350	354	368	264	232	210	1778
Bandung Barat													
RPH-R KBB	671	838	1158	1126	678	646	580	709	614	640	528	634	8822
Bogor													
CIBINONG, RPH	719	723	837	1227	672	655	653	690	810	896	651	670	9203
CITARINGGUL, RPH			3	5		3	3			5	16	4	39
GALUGA, RPH	106	99	120	129	100	103	126	135	131	100	68	67	1284
JONGGOL, RPH	157	151	154	163	168	145	176	175	164	160	105	106	1824
Cianjur													
RPHR-S PT Cianjur Arta Makmur	35						10	97	26	25			193
Garut													
CIAWITALI, RPH							116	90	69	71	54	34	434
RPH-S PD Gembala	24	50	92	141	117	39	31		11	2	9	12	528
Indramayu													
CIPANCUH, RPH							21	21	15	13	7		77
RPH / RPU Pecuk	62	61	81	111	65	81	65	65	57	44	23	2	717
Karawang													
CIKAMPEK, RPH	141	110	138	22	7								418
Kota Bandung													
CIROYOM, RPH	833	1008	1515	1538	832	480	322	348	429	138	90	89	7622
Kota Bekasi													
RPH-S Halal Thoyyiban Food	16		14	6	15	127	164	139	212	253	105		1051
Kota Bogor													
UPTD RPH TERPADU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BOGOR	189	20	86	36	297	293				72			993



Kota Cirebon													
UPTD RPH-R KOTA CIREBON	78	77	95	119	77	75	37	52	53	57	54	50	824
Kota Depok													
UPTD RPH TAPOS	681	665	575	688	411	286	192	265	141	129	156	124	4313
Kota Sukabumi													
PEMDA KOTA SUKABUMI, RPH	186	130	190	349	166	281	156	171	144	134	101	106	2114
Kota Tasikmalaya													
RPH-S Lintas Nusa Pratama	218	475	694	843	392	584	408	319	366	393	302	384	5378
UPTD RUMAH POTONG HEWAN & PASAR HEWAN	154	194	368	443	213	83	44	14		15	7		1535
Kuningan													
UPTD Rumah Potong Hewan	25	4	16	1	76	20	19	23	25	21	29	10	269
Purwakarta													
UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Purwakarta	107	110	81	171	103	120	124	128	99	98	97	118	1356
Sukabumi													
RPH Bojongsokosan	109	112	179	379	128	201	128	139	124	125	121	154	1899
Jawa Tengah													
Banyumas													
RPH-R Tambaksari Purwokerto	143	149	154	269	26	308	115	131	217	160	149	121	1942
Blora													
RPH-R Blora							148	150	130	175	115	175	893
Boyolali													
RPH-R UPTD RPH Ampel	1039	1060	1663	1904	1239	1120	536	1297	1183	1239		2133	14413
Brebes													
RPH-R Brebes										20	24	25	69
Cilacap													
RPH-R Cilacap	87	97	92	87	103	119							585
Demak													
RPH-R Bintoro	28	38	9	19	5	10		2	33	23	26	20	213
Kota Magelang													
RPH-R UPTD RPH dan Lab Kesmavet Kota Magelang							270	271	264	318	272	296	1691
Kota Salatiga													
RPH-R Kota Salatiga	267	236	224	482	247	201	227	214	223	225	208	139	2893
Kota Semarang													
RPH-R Kota Semarang	689	705	754	1114	788	680							4730
Kota Surakarta													
RPH-R UPT RPH Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kota Surakarta	268	236	318	296	240	189	215	235	203	70	371	107	2748
Magelang													



RPH-R Grabag	90	81	74	113	93	78	78	72	85	81	93	87	1025
RPH-R Muntilan	31	26	22	43	31	55	27	25	27	27	32	29	375
Semarang													
RPH-R Candirejo							109	98	91	99	83	86	566
Sukoharjo													
RPH-R Sukoharjo									371			73	444
Tegal													
RPH-R Penusupan Pangkah							91	95	162	140	140	132	760
Wonogiri													
RPH-R Bulukerto	8	18	13	8	5	2	1		3	2	1		61
Wonosobo													
RPH-R Wonosobo	117	163	125	400	119	181	78	110	127	136	105	148	1809
Jawa Timur													
Banyuwangi													
RPH PURWOHARJO	82	15	27		9	11	7	3		0	52	80	286
RPH-R Banyuwangi	333	210	64		46	22		8	14	164	96	265	1222
RPH-R Genteng							7	11	4	93	105	92	312
RPH-R Rogojampi							15	8	15	59	88	127	312
Blitar													
RPH-R Kademangan	5	16	11	14		3	6		1	46	7	10	119
RPH-R Srengat	16	28	8	9	4	4	4	2	1	45	20	19	160
Bojonegoro													
RPH-R Padangan	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0		3
Bondowoso													
RPH-Pujer				53	24	28	29	27	31	42	28	30	292
RPH-R Prajekan				202	112	129	102	85	135	148	116	129	1158
RPH-R Wonosari				56	52	56	52	49	54	46	48	52	465
Gresik													
GRESIK, RPH	485	419	510	532	451	257	199	292	277	528	484		4434
Jombang													
RPH-R Jombang	140	131	157	212	173	142	131	164	173	187	158	171	1939
RPH-R Ngoro	68	46	40	63	46	27	12	26	44	176	153	172	873
RPH-R Mojoagung							165	155	173	59	45	46	643
RPH-R Ploso							40	18	31	36	36	19	180
Kediri													
RPH-R Pare	131	99	157	12	168	10	134	115	3	20	16	19	884
RPH-R Wates							27	17	1	57	26	93	221
Kota Blitar													
RPH-R Kota Blitar	265	244	271	402	268	216	208	208	219	223	199	216	2939
Kota Kediri													
RPH-R Kota Kediri	335	176	363	728	338	418	329	303	365	474	503	429	4761
Kota Malang													
RPH-R Kota Malang	991	980	866	646	1005	693	853	773	969		871	1071	9718
Kota Mojokerto													



RPH-R Kota Mojokerto							224	212	190	205	206	227	1264
Kota Probolinggo													
RPH-R Probolinggo	91	100	63	119	50	30	84	55	63	65	18	7	745
Kota Surabaya													
RPH-R Kedurus	948	1039	1173	868	327	1021	4520	2696	2560	1792	1222	2287	20453
RPH-R Pegirian	2007	2036	2263	1627	676	125	8690	5136	5201	4200	2492	4910	39363
Lamongan													
RPH-R Lamongan	2			1					3	1	1	1	9
Magetan													
MAGETAN, RPH	13	12	3	31	3	35	39	55	61	70	48	58	428
Malang													
WAJAK, RPH						16							16
Mojokerto													
RPH-R Gedeg				5	5	5	4	3	6	8			36
RPH-R Gondang				15	18	15	16	16	14	19	8	11	132
RPH-R Jatirejo				109	107	110	118	124	96	148	118	117	1047
RPH-R Mojosari				53	44	41	35	34	31	37	37	40	352
RPH-R Sooko				32	31	22	24	18	16	20	17	18	198
Ngawi													
RPH-R KANDANGAN NGAWI	74	71	73	122	79	76	63	73	61	68	65	60	885
Pacitan													
RPH-R Pacitan	86	87	88	109	92	78	90	94	83	79	76	107	1069
Pamekasan													
RPH PAKONG	91	94	95	111	92	109	87	94	105	103	92	92	1165
Pasuruan													
RPH-R Wonorejo	10	16	25	20	14	17	17	7	13	9	9	13	170
Probolinggo													
RPH-R Gading	57	61	52	3	97	103							373
RPH-R Krejengan	102	94	87				93	82	91	96	89	87	821
LECES, RPH							91	106	95	99	88	87	566
MARON, RPH							177	184	200	170	159	160	1050
Sidoarjo													
RPH-R Krian	1006	926	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2267
Situbondo													
RPH-R Asembagus				188	107	102	108	109	116	106	102	112	1050
RPH-R Besuki				153	226	190	221	229	196	243	176	217	1851
RPH-R Situbondo	161	174	238	230	177	192	159	152	167	179	145	150	2124
Sumenep													
GANDING, RPH							46	31	30	42	48	25	222
KOTA SUMENEP, RPH	57	57	60	70	56	53	61	51	50	51	53	48	667
MANDING, RPH	300	323	326	391	295	266	278	218	278	314	287	292	3568
Trenggalek													
RPH-R Trenggalek	143	123	136	128	134	100	132	128	109	140	115	132	1520
Tuban													



RPH-R Bancar	21	24	40	33	29	30	31	38	39	40	41	43	409
RPH-R Tuban	109	103	120	132	97	111	93	107	108	116	102	82	1280
Tulungagung													
RPH Bandung	14	20	10	28	22	17	18	8	15	20	15	18	205
RPH-R Ketanon	294	290	309	410	313	233	316	245	249	275	280	287	3501
RPH-R Ngunut		2	3		7	6	14	8	9	11	6	5	71
Kalimantan Selatan													
Banjar													
UPTD RPH Ruminansia dan Unggas Martapura	127	117	118	117	110	98	94	93	92	91	94	84	1235
Barito Kuala													
RUMAH POTONG HEWAN MARABAHAN	4	4	3	4	4	4	5	3	6	5	7	6	55
Tanah Bumbu													
RPH-R Batulicin	63	65	74	78	54	60	60	61	77	61	50	78	781
Tanah Laut													
RPH-R Pelaihari	113	65	105	156	103	94	45	87	72	65	90	91	1086
Kalimantan Tengah													
Kotawaringin Barat													
RPH-R Purbasari	82	68	57	115	19	20	23	53	87	83	100	162	869
Kalimantan Timur													
Berau													
UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau	138	124	147	191	130	113	99	107	122	122	120	160	1573
Kota Balikpapan													
RPH-R Kota Balikpapan	235	79	95	48	164	55	142	77	209	289	249	254	1896
Kota Bontang													
RPH-R Bontang	133	130	190	250	149	221	49	9	5		138	172	1446
Kota Samarinda													
RPH-R Tanah Merah	357	377	441	634	356	447	390	337	433	467	431	450	5120
Kutai Timur													
RPH - R Sangatta	56	52	58	56	64	60	64	60	62	54	58	66	710
Paser													
RPH-R Jone	41	5	22		4	11	15	20	6	32	10	1	167
Penajam Paser Utara													
RPH-R Giri Mukti	73	77	92	128	69	77	68	90	74	70	66	82	966
Kepulauan Riau													
Kota Batam													
RPH-R	38	35	42	69	18	15	6	16	21	24	20	34	338
Lampung													
Kota Bandar Lampung													
Rumah Potong Hewan	74	42	60	8									184
Kota Metro													
UPT Rumah Potong Hewan dan Lobaoratorium Kesmavet	42	14	21	104	26	45	29	19	34	62	50		446



Lampung Barat													
RPH-R Liwa										1			1
Lampung Selatan													
RPH Hj. Suwarni	42	41	42	54	26	33	33		36	51	30	45	433
RPH-R Sidomulyo Kab.Lampung Selatan	1	8	4	17	0	6	10		3				49
Lampung Tengah													
RPH PT. ADI BANGUN BERSAMA	24	22	20	13	14	11	13	13	16	22	18	20	206
Pringsewu													
RPH - R AM Farm Pringsewu	88	75	86	25	220	77	78	28	72	78	24	25	876
Nusa Tenggara Barat													
Kota Bima													
RPH-R Asakota	161	165	171				185	178	181	200	202	214	1657
Sumbawa													
RPH-R Bangkong			163	242	209	198	188	166	181	174	191	206	1918
Sumbawa Barat													
RPH-R Pototano	2												2
Nusa Tenggara Timur													
Belu													
RPH Kota Atambua										135	122	132	389
Kota Kupang													
RPH Bimoku Kota Kupang	1001	993	1183	1334	1150	999	1120	1068	933	1006	917	1182	12886
Kupang													
RPH-R Aldia Oelomin	118	118	131	134	135	102	130	131	130	135	120	121	1505
RPH-R Noelbaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Sikka													
RPH-R Wairklau	225	162	179	175	168	186	200	195	194	202	180	200	2266
Timor Tengah Selatan													
RPH Sapi SoE											64	51	115
Timor Tengah Utara													
KOTA KEFAMENANU, RPH.										103	95	77	275
Papua Selatan													
Merauke													
RPH-R Mopah Lama	61	154	286	306	199	204	217	183	192	237	232	299	2570
Sulawesi Selatan													
Bone													
WATAMPONE, RPH	61	51	56	81		15							264
Gowa													
TAMARUNANG, RPH	0	0	0	0	2	2	8	4	1				17
Kota Makassar													
TAMANGAPA, R.P.H	551	114	712	509	149	45							2080
Kota Parepare													



UPTD RPH Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Pare-Pare							126	111	108	113	120	101	679
Sumatera Barat													
Agam													
UPT RPH dan Pasar Ternak Kabupaten Agam	86	82	108	421	75	67	68	87	102	86	104	93	1379
Dharmasraya													
RPH Gunung Medan	13	13	15	12	11	15	17	18	11	13	10	12	160
Kota Bukittinggi													
BUKITTINGGI, UPTD RPH	337	392	534	735	417	335	322	317	343	364	363	418	4877
Kota Padang													
KOTA PADANG, RPH	430	373	434	551	308	216	144	238	210	26	200	227	3357
Kota Padang Panjang													
UPTD RPH KOTA PADANG PANJANG	234	250	288	412	144			142	246	215	241	208	2380
Kota Payakumbuh													
KOTA PAYAKUMBUH, RPH	244	264	407	432	268	269	262	270	199	113			2728
Kota Sawah Lunto													
RPH Air Dingin										50	63	56	169
Kota Solok													
UPTD RPH Kota Solok	121	93	92	164	79	36	54	62	94	97	117	141	1150
Pasaman													
RPH-R Pasaman	41	40	66	62	44	37	37						327
Sijunjung													
RPH Kumanis	8	4	8	4	4	4	8	8	0	6	0	4	58
Tanah Datar													
Batu Sangkar, RPH	68	64	105	123	60	35	10	47		1			513
Sumatera Selatan													
Kota Palembang													
RPH-R Gandus	161	188	367	352	194	192	159	151	124	94	215	276	2473
Ogan Ilir													
RPH BINA HILIR UTAMA NIAGA	278	272	305		43	194	167	148	75	106	152	117	1857
Sumatera Utara													
Kota Medan													
RPH-R MEDAN	404	481	749	727	386		756	405	475	531	504	1008	6426
Grand Total	27287	26285	33371	36986	23854	22189	33455	29815	30273	27670	23121	33497	347803



Data Pemotongan Kerbau di RPHR Ber NKV sampai Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten>Nama RPH	Bulan												Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aceh													
Kota Banda Aceh													
RPH Kota Banda Aceh					1	1				1	1		4
RPH-R Keudah Banda Aceh			9	7									16
Kota Langsa													0
RPH-R Langsa Barat	1		8	3	1								13
Banten													0
Kota Serang													0
RPH-R Kota Serang					4		3				1		8
Bengkulu													0
Mukomuko													0
RPH-R Padang Penaik	10	5	21	9	6	10	13	10					84
Jambi													0
Bungo													0
Rumah Potong Hewan Kab. Bungo				60	65	81	54	21	13	20	21	12	347
Kota Jambi													0
RPH-R Kota Jambi	51	53	7				20	24		8	45		208
Kota Sungai Penuh													0
RPH-R Sungai Penuh							5	2	2	9	5	5	0
Merangin													0
RPH-R Pulau Rayo				1	2	1		1		1			6
Muaro Jambi													0
RPH-R Sungai Bahar		1											1
Jawa Tengah													0
Demak													0
RPH-R Bintoro	31	56	21	57	28	16	3	4	51	63	58	45	433
Kudus													0
RPH-R Kudus									11	2	17		0
Magelang													0
RPH-R Muntilan									1				0
Jawa Timur													0
Tulungagung													0
RPH Bandung	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
RPH-R Ketanon	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
RPH-R Ngunut		0	0		0	0				0	0	0	0
Kalimantan Selatan													0
Banjar													0
UPTD RPH Ruminansia dan Unggas Martapura	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0



Tanah Bumbu													0
RPH-R Batulicin	4	6	4	4	1	3	2			2	4	3	33
Tanah Laut													0
RPH-R Pelaihari	8	10	9	11	12	8	8	18	12	4	10	9	119
Kalimantan Timur													0
Kota Balikpapan													0
RPH-R Kota Balikpapan	10	3					3	4	10		1	2	33
Kota Samarinda													0
RPH-R Tanah Merah	8	10		1	2		1	1			1	2	26
Nusa Tenggara Barat													0
Sumbawa													0
RPH-R Bangkong			2	7	3	2	2	8	1		2	7	34
Nusa Tenggara Timur													
Sikka													
RPH-R Wairklau										2		2	
Papua Selatan													0
Merauke													0
RPH-R Mopah Lama		2	4	3	2	3	4	4	2	5	4	3	36
Sulawesi Selatan													0
Kota Makassar													0
TAMANGAPA, R.P.H	2												2
Kota Parepare													
UPTD RPH Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Pare-Pare											1		
Sumatera Barat													0
Agam													0
UPT RPH dan Pasar Ternak Kabupaten Agam			1	50	1	1			1			1	55
Dharmasraya													0
RPH Gunung Medan				1									1
Kota Bukittinggi													0
BUKITTINGGI, UPTD RPH	41	39	47	94	35	47	33	30	32	38	35	38	509
Kota Padang													0
KOTA PADANG, RPH		7	7	6	2		2	13		1			38
Kota Padang Panjang													0
UPTD RPH KOTA PADANG PANJANG	8	4	6	17		2		4	4	3	6	12	66
Kota Payakumbuh													0
KOTA PAYAKUMBUH, RPH	1	7	1	14		1	2	4					30
Kota Solok													0
UPTD RPH Kota Solok			5	13		2							20
Pasaman													0
RPH-R Pasaman				2	0								2
Sijunjung													0
RPH Kumanis			1										1



Tanah Datar													0
Batu Sangkar, RPH	11	6	8	9		3		2					39
Sumatera Utara													0
Kota Medan													0
RPH-R MEDAN		1	13	9		2	3						28
Grand Total	18	21	17	37	16	18	15	15	24	17	195	141	2192



Lampiran 7. Data Pemotongan Sapi di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Bulan												Grand Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Aceh	692	568	5481	4374	922	3550	522	699	828	950	1040	1041	20667
Bali	2002	1472	1760	1472	1635	1513	1629	1510	1341	1421	1424	1314	18493
Bangka Belitung	443	400	380	371	238	332	302	143	333	166	279	63	3450
Banten	3585	3306	4797	5861	3360	4666	4021	2984	5109	3802	4599	5101	51191
Bengkulu	567	647	779	796	614	577	511	560	432	409	412	492	6796
Di Yogyakarta	1352	1403	1407	1112	1171	1061	952	1022	494	289	226	228	10717
Dki Jakarta	3382	3352	4391	4922	3439	2804	2183	3828	2964	1595	554	4247	37661
Gorontalo	723	637	586	655	584	416	421	623	601	605	497	544	6892
Jambi	718	572	991	1583	779	2153	629	976	809	870	819	812	11711
Jawa Barat	8503	8197	11405	13704	8683	11513	6716	6963	6852	6539	5433	5624	100132
Jawa Tengah	7925	7430	8376	10827	8211	7241	6368	7260	11521	7469	5913	9954	98495
Jawa Timur	14437	13851	13998	13057	12076	13060	22239	16704	17277	15452	13373	17518	183042
Kalimantan Barat	792	760	895	1661	815	886	736	717	718	739	691	752	10162
Kalimantan Selatan	752	681	774	792	450	500	488	447	385	448	573	552	6842
Kalimantan Tengah	241	253	291	288	144	162	147	144	174	132	139	205	2320
Kalimantan Timur	1148	938	1159	1445	905	1050	876	734	946	1070	1108	1225	12604
Kalimantan Utara	50	82	93	123	65	131	37	36	26	27	19	24	713
Kepulauan Riau	80	99	117	231	74	59	39	51	46	37	102	88	1023
Lampung	726	633	707	1254	682	473	500	366	458	550	437	423	7209
Maluku	327	373	439	328	370	297	581	316	306	271	235	217	4060
Maluku Utara	41	113	250	429	193	16565	64	210	161	170	182	238	18616
Nusa Tenggara Barat	1999	1292	1458	929	1671	723	712	1084	1149	1158	1236	1254	14665
Nusa Tenggara Timur	2132	2156	2491	2660	2493	2282	2548	2489	2454	2523	2284	2503	29015
Papua	95	87	93	73	75	81	60	96	102	91	93	68	1014
Papua Barat	8												8
Papua Pegunungan		5					188						193
Papua Selatan	61	154	286	306	212	204	217	183	192	237	232	299	2583
Papua Tengah						0				0			0
Riau	1392	1336	1393	639	406	2496	266	278	213	225	237	199	9080
Sulawesi Barat	253	195	177	196	177	138	126	131	165	113	115	104	1890
Sulawesi Selatan	2450	1863	2411	2414	1817	2473	1695	1665	1489	1485	1500	1282	22544
Sulawesi Tengah	886	794	613	667	369	328	352	374	301	336	348	354	5722
Sulawesi Tenggara	1256	1112	1140	1515	1143	1471	1054	903	879	828	765	691	12757
Sulawesi Utara	498	410	460	363	487	642	556	163	164	172	156	55	4126
Sumatera Barat	2315	2342	3198	4093	2175	1600	1381	1726	1745	1496	1566	1705	25342
Sumatera Selatan	1715	1693	2144	2447	1407	2108	1485	1513	1340	1435	1726	1689	20702
Sumatera Utara	1674	1663	2475	2440	1523	723	8757	1244	1238	1249	1225	1771	25982
Grand Total	65220	60869	77415	84028	59365	84278	69358	58142	63212	54359	49538	62636	788420



Data Pemotongan Kerbau di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Bulan												Grand Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Aceh	65	71	1917	954	307	1199	136	123	229	205	194	207	5607
Banten	9	6	15	70	17	15	11	1	9	0	1	0	154
Bengkulu	66	47	115	135	52	60	60	56	99	192	115	88	1085
Jambi	308	344	839	783	349	547	357	367	311	333	263	255	5056
Jawa Barat	3	9	6	4	5	70	2	5		3	5	1	113
Jawa Tengah	148	169	138	200	135	76	28	28	268	106	75	54	1425
Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	3	4	3	9	6	7	12	18	10	9	4	9	94
Kalimantan Selatan	81	35	22	21	13	17	13	18	12	6	16	21	275
Kalimantan Tengah							4						4
Kalimantan Timur	18	13		1		2	4	7	10	1	2	5	63
Kalimantan Utara	0	23	18	1	4	1	5	5	1	12	13	4	87
Lampung	1			10									11
Maluku								1					1
Nusa Tenggara Barat	128	123	123	131	106	105	94	156	140	142	124	169	1541
Nusa Tenggara Timur	34	50	68	46	37	45	74	99	97	98	49	58	755
Papua Selatan		2	4	3	3	2	4	4	2	5	4	3	36
Riau	68	106	212	135	38	12	6	2	7	5	4	4	599
Sulawesi Barat	41	18	26	6	48	10	51	25	56	48	45	27	401
Sulawesi Selatan	5	3	0	1	0	27	0	0	2	0	3		41
Sulawesi Tengah				1	1		1				2		5
Sulawesi Tenggara	1	1					1						3
Sulawesi Utara						0							0
Sumatera Barat	124	128	219	424	91	70	70	81	62	61	62	74	1466
Sumatera Selatan	27	25	15	50	8	17	10	7	6	11	10	22	208
Sumatera Utara	1532	201	1249	324	193	165	143	157	151	144	136	166	4561
Grand Total	2662	1378	4989	3309	1413	2447	1086	1160	1472	1381	1127	1167	23591



Lampiran 8. Data Pemotongan di RPHU Ber NKV sampai Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten>Nama RPH	Bulan												Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bali													
Tabanan													
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Tabanan	182.175	223.829	167.562	280.196	328.960	284.665	444.918	354.586	346.532	303.342	313.284	333.938	3.563.987
PT. Ciomas Adisatwa - Tabanan	240.000	147.900	128.900	184.000	133.006	138.000	186.000	140.175	141.000	162.000	120.000	224.000	1.944.981
Banten													
Lebak													
PT. Sinar Ternak Sejahtera - Lebak	1.433.904	827.047	634.920	406.777	640.469	450.569	663.010	681.197	673.032	691.524	717.082	591.518	8.411.049
Serang													
PT. Charoen Pokphand Indonesia Divisi Duck				231.225	557.743	568.355	641.047	711.375	771.515	834.619	825.276	754.267	5.895.422
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Cikande 1	1.526.462	1.134.799	1.228.767	927.851	156.009	122.270	146.610	114.513	119.175	103.521	103.752	246.926	14.118.013
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Cikande 3	1.759.406	1.308.269	1.402.182	991.658	179.369	143.392	173.096	109.574	134.698	123.423	984.981	143.840	16.520.448
PT. Cibadak Indah Sari Farm (Slaughter House 01)	585.000	618.241	463.458	303.612	676.606	538.878	545.465	547.727	548.681	646.172	515.341	651.015	6.640.196
Tangerang													
PT. So Good Food Manufacturing - Tangerang	456.375	320.998	314.881	581.444	494.832	494.140	597.298	737.389	668.497	680.782	691.051	707.301	6.744.988
Bengkulu													
Kota Bengkulu													
RPU Mitra Farm	2.300	2.350	2.209	301.0	255.0	280.0	360.0	370.0	390.0	425.0	355.0	425.0	38.469
Di Yogyakarta													
Bantul													
PT. Dagsap Endura Eatore	66.749	66.064	60.669	100.962	627.94	100.343	406.02					746.82	572.865
Sleman													
PT. Ciomas Adisatwa - Sleman	923.195	738.249	779.736	839.151	747.226	707.327	984.322	798.014	800.721	100.643	542.248	101.673	9.883.353
PT. Janu Putera Sejahtera	36.815	7.897	37.612	471.68	387.26	442.87	551.91	161.96	154.90	359.0	334.8	129.6	307.616
RPU Saliman Riyanto Raharjo/RPU Aneka Usaha			268.299	756.57	244.053	796.42	176.995	198.844	217.307	310.007	244.285	943.73	1.909.462
Dki Jakarta													
Kota Jakarta Barat													
PT. Kartika Eka Dharma	1.115.739	940.044	157.337	917.954	737.275	785.815	111.906	695.867					6.469.097
PT. RPH-U Rawa Lele							363.584	369.840	363.237	360.263	359.879	370.318	2.187.121
Kota Jakarta Selatan													
RPH-U Petukangan Utara	558.702	567.472	522.815	505.910	705.726	603.945	686.482	553.108	524.255	682.340	568.285	603.933	7.082.973
Kota Jakarta Timur													
RPH-U Rawa Kepiting	929.467	845.057	869.303	785.967	968.208	849.215	884.193	898.516	883.569	833.411	839.144	819.761	10.405.811
RPH-U Rawa Terate							258.342	276.716	215.314	303.197	262.871	243.126	1.559.566
Kota Jakarta Utara													
RPHU Rorotan	884	737	865	475.25	500.70	508.35	571.95	665.05	692.10	732.50	716.90	715.70	560.336
Jambi													



Kota Jambi														
RPU Mitra Sukses Sejahtera							660	356		850	339	300	87.60	
							0	00		0	00	0	0	
Jawa Barat														
Bandung														
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Bandung	2.16 3.42 2	1.49 2.14 9	1.04 2.50 0	904 978	181 587 4	169 178 5	204 938 4	163 788 2	162 880 7	178 780 8	169 866 2	161 051 4	19.52 3.765	
RPH-U Swasta Boga Samitra	40.1 32	28.7 67	10.5 50	431 15	557 87	345 28	431 30	371 48	302 17	158 35	191 53	386 11	396.9 73	
RPHU Swasta Mandiri Agro Sambas											504 00		50.40 0	
Bekasi														
PT. Giovindo Jaya Bahagia	18.5 91												18.59 1	
Bogor														
PT. Argo Makmur Proteindo	-	-	-	0	0	0	0	0	826 47	200 81	0	0	102.7 28	
PT. Ciomas Adisatwa - Bogor	1.39 2.32 6	1.04 6.81 5	1.00 4.23 1	115 780 0	846 719	791 049	101 205 9	845 963	960 239	119 370 4	675 666	126 116 0	12.18 7.731	
PT. Raja Jeva Nisi (RPHU Nusantara)	902. 900	683. 437	719. 049	572 548	858 806	700 789	783 148	943 596	583 016	113 792 1	807 648	764 051	9.456 .909	
PT. Sreeya Sewu Indonesia-Bogor	1.43 8.94 0	1.26 2.13 2	1.37 0.01 1	142 221 5	929 115	122 959 0	148 277 1	110 985 1	156 033 1	128 820 6	135 941 2	174 349 1	16.19 6.065	
Ciamis														
PT CJ PIA				116 829	929 93	113 483	162 227	143 727	182 030	112 623	674 74	100 654	1.092 .040	
RPHU PT. Karya Indah Pertiwi	26.4 12	20.6 03	20.9 00	216 64	210 88	212 02	245 81	192 13	194 47	280 42	208 83	274 72	271.5 07	
Cianjur														
PT. Berdikari				273 84	791 8	692 14	649 52	827 63	724 64	883 14	760 77	295 18	518.6 04	
PT. QL Trimitra	304. 624	266. 691	158. 695	201 697	149 420	136 215	332 811	170 763	160 200	225 452	276 154	924 48	2.475 .170	
PT. Arwinda Perwira Utama	35.2 91	22.9 36											58.22 7	
Cirebon														
PT. Ender Agro Mitra	60.0 61	25.5 91	22.7 09	152 32	127 31	180 89	172 73	186 66	139 12	185 93	175 10	198 14	260.1 81	
Garut														
RPHU PT. Sidoagung Food Processing Garut	51.7 00	63.9 50	174. 373	0	0	0	0	0	0	461 644	279 662	376 176	1.407 .505	
Kota Banjar														
PT. Karya Indah Pertama	115. 825	73.7 84	52.9 87	622 92	956 39	906 48	101 493	616 11	497 40	436 97	665 79	104 944	919.2 39	
Kuningan														
RPHU Suja - Kuningan	671. 226	587. 232	302. 781	307 526	558 390	693 776	787 207	807 146	798 267	793 714	627 845	823 076	7.758 .186	
Majalengka														
PT Charoen Pokphand Indonesia - Majalengka	2.05 4.09 0	1.34 5.55 8	804. 347				177 486 8	163 173 4	105 677 8	988 347	935 938	978 511	11.57 0.171	
Purwakarta														
PT. Ciomas Adisatwa - Purwakarta	843. 605	636. 893	722. 803	873 043	613 704	468 528	671 187	509 643	613 404	907 759	557 601	100 828 0	8.426 .450	
RPHU Malindo Feedmill	349. 299	229. 461	152. 196	184 718	325 350	318 708	352 521	486 130	405 024	455 924	534 838	339 040	4.133 .209	
Subang														
PT. Surya Unggas Mandiri - Subang	1.10 3.86 7	732. 821	633. 751	357 600	632 360	480 635	593 776	558 451	527 293	462 510	481 690	519 203	7.083 .957	
Sukabumi														
PT. Intan Sinar Abadi	71.4 60	68.6 45	73.3 42	634 72	675 90	713 05	951 41	792 43	897 41	763 30	756 20	159 241	991.1 30	



PT. So Good Food - Sukabumi	151.177	20.073	-	0	137478	145872	187929	164983	233147	83980			1.124.639
Jawa Tengah													
Banyumas													
PT Charoen Pokphand Indonesia - Banyumas	1.528.557	972.875	623.228	500900	1052481	1336736	1644507	1277404	1358922	1466260	1364933	1430490	14.557.293
RPHU Agro Jaya	74.509	77.548	31.714	22502	43037	77304	96346	81660	81818	73488	40378	185614	885.918
Boyolali													
PT. MUSTIKA JAYA LESTARI								31893	37245	23402	35846	49184	177.570
PT. So Good Food - Boyolali	566.175	508.534	307.654	404964	736900	654670	717600	706529	916717	677831	734697	534563	7.466.834
Brebes													
agung freshindo	104.153	125.245	102.435	62763	72435	132847	151131	79904	226131	78966	88658	69209	1.293.877
Demak													
PT. Sinar Pahala Utama	243.859	216.525	168.491	117012	246276	248271	219056	229321	178632	163366	189994	229721	2.450.524
Kebumen													
PT. Cemerlang Unggas Lestari - Gudang Kebumen	533.714	425.839	366.025	281202	474842	423305	578972	515621	519686	619671	532241	503883	5.775.001
Kendal													
RPHU PT. Asia Pangan Utama		32.046	148.420	84599	182192	118505	170422	150081	168386	316998	274934	546000	2.192.583
Kota Salatiga													
PT. Charoen Pokhphand Indonesia - Salatiga	2.321.254	1.581.356	1.620.776	1378057	2185298	1878766	2864905	2315267	2196666	2315676	2533764	2416848	25.608.633
Magelang													
PT. Ciomas Adisatwa Magelang	1.021.790	756.149	774.389	930274	973858	951651	1297975	1006184	1002393	1349165	646994	1355140	12.065.962
Pati													
PT. Samaco Karkasindo Utama			27.274	131154	48675	24531	112225	36570	78146				458.575
Pemalang													
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Pemalang	624.688	488.574	496.599	432805	795439	906882	913780	681707	758234	677879	635836	766730	8.179.153
PT. Ciomas Adisatwa Pemalang	1.106.701	1.044.555	968.953	1083738	1056661	1066510	1398755	1130045	1270540	1730520	1048065	1822400	14.727.443
Semarang													
PT. Ciomas Adisatwa - Semarang	911.050	694.855	684.405	762934	555182	630483	842393	710965	706622	916135	526583	956320	8.897.927
Sragen													
PT Charoen Pokphand Indonesia - Sragen	947.424	723.098	557.889	541535	1044209	949660	1294348	922060	852802	955150	944867	1020869	10.753.911
Sukoharjo													
RPU Union Karkas							81338	77495	88784	72375	11403		331.395
Wonogiri													
PT. Widodo Makmur Unggas, Tbk				0	0	0	0	0	0	0	156856	785288	942.144
Jawa Timur													
Bondowoso													
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Bondowoso	796.983	590.553	294.898	462263	865339	634321	780182	722621	752758	660314	650119	876877	8.087.228
Jombang													
PT. Semesta Mitra Sejahtera - Jombang	1.622.500	1.457.844	1.494.209	1035545	1817256	1474193	1808032	1428885	1139914	1617841	1340427	1090368	17.327.014
Lamongan													



RPH-U Lamongan	58.1 33	55.0 56	39.2 66	413 09	274 47	687 7								228.0 88
Madiun														
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Madiun	796. 961	636. 818	560. 709	404 718	929 415	655 143	930 635	838 428	970 393	778 808	827 402	100 975 5	9.339 8.799 .185	
Mojokerto														
CV. Aneka Usaha Abadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Mojokerto	966. 834	841. 701	920. 457	790 146	128 287 5	102 293 2	142 294 7	118 209 4	114 148 9	113 556 1	107 907 0	122 269 3	13.00 8.799	
RPHU PT. Reza Perkasa - Kemantren	344. 143	266. 828	294. 080	192 081	324 553	268 773	350 827	198 317	331 734	420 124	177 542	235 343	3.404 .345	
RPHU PT. Reza Perkasa - Ngares	643. 066	427. 254	496. 274	386 594	724 593	695 563	854 455	716 761	654 280	846 972	481 025	525 155	7.451 .992	
PT. Tera Mulia Koorporindo	58.5 00		43.9 55										102.4 55	
Pasuruan														
PT. Wonokoyo Jaya Farm	983. 920	850. 810	970. 013	634 711	737 943	814 073	105 402 7	940 227	129 897 1	733 78	280 289	274 290	8.912 .652	
RPHU Kraton Makmur IA-PT. Multi Natura				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RPHU PT. Dinamika Megatama Citra	522. 000	380. 800	375. 950	342 300	536 250	437 340	581 300	488 900	379 550	422 900	255 800	557 900	5.280 .990	
Sidoarjo														
PT. Ciomas Adisatwa - Sidoarjo	1.32 3.96 5	1.07 5.48 0	1.03 5.24 3	117 905 6	102 876 9	894 220	111 143 3	764 799	740 982	131 744 0	886 493	171 155 0	13.06 9.430	
PT. So Good Food - Sidoarjo	383. 873	179. 702	137. 466	181 492	326 105	211 735	452 284	312 527	398 972	325 278	338 846	281 486	3.529 .766	
Tulungagung														
RPHU PT. Gambir Sejahtera Utama	81.3 16	52.0 86	34.9 73	488 22	931 95	564 31	802 44	386 27	313 93	433 09	742 0	638 38	631.6 54	
Kalimantan Barat														
Kota Singkawang														
Sujaya Processing Food-Singkawang	24.0 22	29.3 65	11.3 04	154 58	424 27	252 64	234 62	222 07	190 37	176 27	141 09	139 36	258.2 18	
Kubu Raya														
RPHU PT. Adilmart	29.1 88	25.0 65	31.2 96	366 44	229 18	226 79	266 40	229 07	257 66	216 45	310 69	269 60	322.7 77	
RPHU PT. Bintang Sejahtera Bersama-RPHU Kubu Raya	17.1 26	28.3 25	58.9 00	515 84	495 65	415 07	773 69	493 20	532 80	392 03	499 93	435 95	559.7 67	
Kalimantan Selatan														
Tanah Laut														
PT. Ciomas Adisatwa - Tanah Laut	609. 635	411. 349	473. 410	512 479	318 005	369 029	508 355	412 204	406 330	505 820	296 800	558 290	5.381 .706	
Kalimantan Timur														
Kota Bontang														
RPU Nur Iksan				111 70	345 0	713 0	470 0	526 0	560 0	705 0	370 0	212 50	69.31 0	
Kutai Kartanegara														
RPHU PT. Mitra Sinar Jaya-Samboja	39.0 74	28.2 15	28.7 65	189 89	698 90	594 12	635 44	677 28	696 31	710 22	795 12	590 90	654.8 72	
Kalimantan Utara														
Nunukan														
RPH-U CV. Cahaya Fatimah, Abdul Suardi		2.70 0	4.35 0	130 0	475 0	200 0	275 0	230 0	250 0	275 0	250 0	325 0	31.15 0	
Lampung														
Kota Metro														
UPT Rumah Potong Hewan dan Lobaoratorium Kesmavet	2.90 0	3.00 0	3.00 0	300 0	300 0	300 0	300 0	154 1	300 0	150 0	268 0		29.62 1	
Lampung Selatan														
PT. Ciomas Adisatwa Lampung	784. 625	633. 606	682. 892	782 180	639 007	577 642	839 650	676 942	743 712	928 866	510 889	971 400	8.771 .411	



Sulawesi Selatan													
Kota Makassar													
PT. GEMILANG PANGAN PERKASA	6.606	-	-	0	0	0	0	0	0	395262	124050	100399	626.317
RPHU PT. Charoen Pokphand Indonesia (PT. Bintang Sejahtera Bersama-RPHU Makassar)	245.851	242.516	528.217	220.350	454.381	513.420	503.537	449.509	334.746	322.652	225.314	169.136	4.209.629
Maros													
PT. Ciomas Adisatwa - Maros	388.180	287.410	321.375	342.050	282.570	302.240	439.530	343.105	376.230	453.910	236.250	455.000	4.227.850
Sulawesi Utara													
Minahasa Utara													
PT. Charoen Pokphand Indonesia-RPHU Manado							116.716	557.52	728.22	904.36	373.38	495.86	422.650
Sumatera Selatan													
Muara Enim													
PT. Semesta Mitra Sejahtera - Muara Enim	538.049	456.585	413.528	397.590	458.858	396.448	399.465	359.931	310.633	308.819	288.296	308.953	4.637.155
Sumatera Utara													
Deli Serdang													
PT. Charoen Pokphand Indonesia - Medan	790.868	569.539	774.762	740.906	107.9055	657.746	906.554	723.418	646.143	828.375	795.726	834.082	9.347.174
PT. Ciomas Adisatwa - Deli Serdang	671.160	520.840	449.266	561.948	443.680	434.950	648.174	504.784	486.948	629.913	365.255	728.900	6.445.818
Kota Medan													
PT. Expravet Nasuba	442.563	323.013	346.479	408.939	342.792	408.546	497.700	469.361	417.466	473.269	374.016	369.016	4.873.160
Grand Total	447.680.36	343.801.50	320.080.29	301.002.43	393.385.68	358.235.95	483.186.98	403.859.11	401.037.04	435.405.34	360.052.52	441.609.36	468.933.656



Lampiran 9. Data Pemotongan Unggas di Seluruh Indonesia sampai Tahun 2024

Provinsi	Bulan												Grand Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Aceh	42956	151573	441247	295370	107124	315046	164955	219630	130149	164105	138639	147851	2318645
Bali	877564	496123	456099	585184	461966	1048500	920490	785533	779793	773384	734194	861950	8780780
Banten	5761147	4209354	4044208	3442567	5723439	4708570	5643885	4918570	5200461	5122540	4485977	5069398	58330116
Bengkulu	2300	2350	2209	3060	2550	2800	3600	3700	3900	4250	3550	4250	38519
Di Yogyakarta	1026759	812210	1146316	1062938	1092799	931599	1257110	1013054	1033518	1320031	789881	1187081	12673296
Dki Jakarta	3485235	3174210	2459386	2935678	3332289	3082422	3647337	2993353	2441619	2521028	2353635	2340473	34766665
Jambi	1426172	1039471	1147892	1011157	923171	768769	1098360	1323890	861353	894818	1254311	915629	12664993
Jawa Barat	11998092	8780938	7463466	7133073	8577555	8780534	10663506	9455981	9160345	10373499	8753692	10141190	111281871
Jawa Tengah	9983874	7647199	6878252	6734439	9564548	9400121	12563953	9952706	10441724	11436882	9766049	12672259	117042006
Jawa Timur	8607168	6852167	6727568	5730092	8725176	7202281	9463296	7658821	7869010	7670310	6353404	7871033	90730326
Kalimantan Barat	70336	82755	101500	103686	114910	89450	127471	94434	98083	79231	98559	86442	1146857
Kalimantan Selatan	783821	551877	641993	624210	418673	490202	683692	545593	549526	670582	396939	646957	7004065
Kalimantan Tengah							4230	11425	15450	11350		500	42955
Kalimantan Timur	39074	28215	28765	30159	73340	66542	68244	72988	75231	78072	83212	80340	724182
Kalimantan Utara	106336	105469	101050	119336	81238	85967	101470	95155	45534	25450	24700	26650	918355
Kepulauan Riau	94311	127867	210971	395259	216514	179169	188495	149086	143367	132882	213648	465621	2517190
Lampung	977600	803161	849732	950429	841067	709640	981005	796846	889827	1024356	652294	1101760	10577717
Maluku	15327	14441	9173	0	0	0							38941
Nusa Tenggara Barat	1164	509	643	73	443	146	576	525	730	1209	160		6178
Nusa Tenggara Timur		2060	2440	2933	3510	1338	1227	934	1916	2524	1463	2502	22847
Papua	15890	11125	9921			1210	11095	2090	1355				52686
Papua Selatan	150	650	0										800
Riau	10409	9966	8638	3699	6040	7163	8553	5940	5463	4974	4477	4773	80095
Sulawesi Barat	14834	14426	12714	17345	16360	17274	14400	15536	16788	16959	15583	16920	189139
Sulawesi Selatan	640637	529926	849592	562400	736951	815660	943067	792614	710976	1171824	585614	724535	9063796
Sulawesi Utara	115017	117768	158037	164024	151971	168727	247389	155203	159324	164512	104730	102579	1809281
Sumatera Selatan	538049	456585	413528	397590	458858	396448	399465	359931	310633	308819	288296	308953	4637155
Sumatera Utara	2848510	2285079	2560930	2269626	2501024	1969386	2871160	2347631	2206505	2573611	2166276	2733141	29332879
Grand Total	49482732	38307474	36726270	34574327	44131516	41238964	52078031	43771169	43152580	46547202	39269283	47512787	516792335



Lampiran 10. Data Jumlah Pemotongan Ternak Babi di RPHB Ber NKV sampai Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten>Nama RPH	Bulan												Grand Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dki Jakarta													
Kota Jakarta Barat													
RPH-B Kapuk										5435	5380	6331	17.146
Jawa Tengah													
Karanganyar													
CV. MULIA PUTERA ABADI	21	41	9										71
Bali													
Kota Denpasar													
RPH-R Kota Denpasar	3.862	1.000	1.896	491	6.236	6.585	7.925	7.893	6.404	6666	6496	7121	62.575
Jambi													
Kota Jambi													
RPH-B Kota Jambi	113	80	19	203	204	182	447	82		21	101	5	1.457
Kepulauan Riau													
Kota Batam													
RPH-Babi Pulau Bulan	447	499	640	310	409	514	388	427	482	284	462	864	5.726
Grand Total	4.443	1.620	2.564	1.004	6.849	7.281	8.760	8.402	6.886	12.406	12.439	14.321	86.975



Lampiran 11. Data Pemotongan Ternak Babi di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Bulan												Grand Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Bali	21260	6708	13621	6813	7534	18708	9123	10109	11109	13617	10035	10713	139350
Bangka Belitung	386	280	329	261	311	245	312	168	292	177	337	88	3186
Dki Jakarta	6415	5606	6308	4987	5529	5409	5890	5693	5665	5435	5380	6331	68648
Jambi	166	133	61	51	47	55	523	140	54	89	165	118	1602
Jawa Barat	104	102	88	79	75	100	76	76	75	62	65	84	986
Jawa Tengah	326	987	1072	1195	1986	306	351	392	355	148	622	237	7977
Jawa Timur	49	39	49	61	50	58	51	46	59	62	65	59	648
Kalimantan Barat	2771	2685	3259	2649	3015	2692	2471	2354	2420	2361	1941	2671	31289
Kalimantan Utara	56	248	162	93	107	110	142	89	188	102	84	111	1492
Kepulauan Riau	805	665	737	468	526	642	510	458	534	284	627	911	7167
Lampung	12	7	6	6	6	3	5	5	6	6	6	6	74
Maluku	133	171	189	142	149	143	130	136	127	115	102	117	1654
Nusa Tenggara Barat									100				100
Nusa Tenggara Timur	1017	950	1196	1283	1135	1419	1465	1461	1295	1379	1187	1887	15674
Papua	129	117	56	20	58	38	49	57	36	56	35	65	716
Papua Selatan			12	19	17	23	17	23	22	12	11	12	168
Papua Tengah						3				2			5
Riau	469	478	403	405	360	174	96	221	103	141	226	76	3152
Sulawesi Barat	623	395	474	98	995	210	703	271	608	721	610	449	6157
Sulawesi Utara	5069	4687	4534	3532	7067	2896	2377	2029	1776	1581	1226	868	37642
Sumatera Utara	2763	2821	2662	3623	3276	2131	4055	2900	2926	2512	2270	3376	35315
Grand Total	42553	27079	35218	25785	32243	35365	28346	26628	27750	28862	24994	28179	363002



Lampiran 12. Data sampel Produk Hewan Pangan yang telah diuji 2024

Jenis Produk	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Jumlah	% Memenuhi Syarat
Daging	18.009	1.591	19.600	91,88%
Susu	737	153	890	82,81%
Telur	4.780	154	4.934	96,88%
Rata-Rata				90,52%

No	UPT/ Jenis Sampel PSAH	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Grand Total
1	BBVet Denpasar	3.227	209	3.436
2	BBVet Maros	2.192	100	2.292
3	BBVet Wates	2.098	894	2.992
4	BPMSPH Bogor	9.452	501	9.953
5	BVet Banjarbaru	1.315	31	1.346
6	BVet Bukittinggi	1.584	77	1.661
7	BVet Lampung	2.080	30	2.110
8	BVet Medan	1.287	9	1.296
9	BVet Subang	169	14	183
10	BVet Jayapura	122	33	155
	Grand Total	23.526	1.898	25.424

No	UPT/ Jenis Sampel PSAH	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Grand Total
1	BBVet Denpasar	3.227	209	3.436
	Daging	3.042	200	3.242
	Susu	55	1	56
	Telur	130	8	138
2	BBVet Maros	2.192	100	2.292
	Daging	1.494	60	1.554
	Telur	698	40	738
3	BBVet Wates	2.098	894	2.992
	Daging	1.633	779	2.412
	Susu	281	71	352
	Telur	184	44	228
4	BPMSPH Bogor	9.452	501	9.953
	Daging	7.849	400	8.249
	Susu	267	77	344
	Telur	1.336	24	1.360
5	BVet Banjarbaru	1.315	31	1.346
	Daging	1.253	31	1.284
	Susu	12	-	12
	Telur	50	-	50



6	BVet Bukittinggi	1.584	77	1.661
	Daging	262	66	328
	Susu	14	-	14
	Telur	1.308	11	1.319
7	BVet Lampung	2.080	30	2.110
	Daging	1.131	7	1.138
	Susu	76	3	79
	Telur	873	20	893
8	BVet Medan	1.287	9	1.296
	Daging	1.138	7	1.145
	Susu	9	1	10
	Telur	140	1	141
9	BVet Subang	169	14	183
	Daging	116	8	124
	Susu	23	-	23
	Telur	30	6	36
10	BVet Jayapura	122	33	155
	Daging	91	33	124
	Telur	31	-	31
Grand Total		23.526	1.898	25.424



Lampiran 13. Hasil kuisisioner terhadap tingkat kemanfaatan sarana prasana kesmavet

**KUESIONER TINGKAT KEMANFAATAN
SARANA PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
KEGIATAN RENOVASI RUMAH POTONG HEWAN DAN SARANA
PENDUKUNGNYA**

1	Tanggal Pengisian Kuisisioner	: 18 Desember 2024
2	Nama/ No Telp. Responden	: Drh. Suprijanto
3	Jabatan Responden	Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Provinsi	: Jawa Barat
5	Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
6	Nama Dinas	: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
7	Rincian Kegiatan *) ceklis salah satu	: <input checked="" type="checkbox"/> Renovasi RPH-R : <input type="checkbox"/> Renovasi RPH-U : <input type="checkbox"/> Renovasi RPH-B
8	Lokasi Nama RPH Alamat RPH	: RPH Tapos Depok : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kota Depok
9	Nama Penanggung Jawab Kegiatan	: Drh. Suprijanto
10	Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11	No Telepon/ Hp Penanggung Jawab Kegiatan	: 62 821-1520-0472
12	Jumlah Anggaran yang diterima (Rp)	: 697.000.000.000
13	Komponen Kegiatan	: Restraining box Mark IV 1 Unit Restraining box tipe stunning 1 Unit Skiining Craddle 20 Unit
14	Realisasi Keuangan	: 608.000.000



	(Rp)																																																													
15	Realisasi Fisik	: Restraining box Mark IV 1 Unit Restraining box tipe stunning 1 Unit Skiining Craddle 20 Unit																																																												
17	Jumlah pemotongan tahun 2024 (lampirkan data pemotongan per bulan)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Jenis</th> </tr> <tr> <th>Bulan</th> <th>Sapl Impor</th> <th>Sapl Lokal</th> <th>Grand Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>681</td><td></td><td>681</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>641</td><td>24</td><td>665</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>552</td><td>23</td><td>575</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>585</td><td>103</td><td>688</td></tr> <tr><td>May</td><td>407</td><td>4</td><td>411</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>286</td><td></td><td>286</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>192</td><td></td><td>192</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>265</td><td></td><td>265</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>141</td><td></td><td>141</td></tr> <tr><td>Oct</td><td>129</td><td></td><td>129</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>156</td><td></td><td>156</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>69</td><td></td><td>69</td></tr> <tr> <td>Grand Tot</td> <td>4104</td> <td>154</td> <td>4258</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis				Bulan	Sapl Impor	Sapl Lokal	Grand Total	Jan	681		681	Feb	641	24	665	Mar	552	23	575	Apr	585	103	688	May	407	4	411	Jun	286		286	Jul	192		192	Aug	265		265	Sep	141		141	Oct	129		129	Nov	156		156	Dec	69		69	Grand Tot	4104	154	4258
Jenis																																																														
Bulan	Sapl Impor	Sapl Lokal	Grand Total																																																											
Jan	681		681																																																											
Feb	641	24	665																																																											
Mar	552	23	575																																																											
Apr	585	103	688																																																											
May	407	4	411																																																											
Jun	286		286																																																											
Jul	192		192																																																											
Aug	265		265																																																											
Sep	141		141																																																											
Oct	129		129																																																											
Nov	156		156																																																											
Dec	69		69																																																											
Grand Tot	4104	154	4258																																																											
		Penanggung Jawab Kegiatan Bandung, 18 Desember 2024  Drs. Supriyanto NIP197203112006041006																																																												

Tabel jumlah pemotongan di RPH Tapos dan RPH Gowa

No	Nama RPH-R	Provinsi	Kab/Kota	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1	UPTD RPH TAPOS	Jawa Barat	Kota Depok	681	665	575	688	411	286	192	265	141	129	156	124	4313
2	TAMARUNANG, RPH	Sulawesi Selatan	Gowa	0	0	0	0	2	2	8	4	1				17



KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
 Nama Responden : Drh. Edi Budi Susila, M.Si.
 Jabatan : Kepala BBVF Pusvetma
 Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:

SS = 5; S = 4; Rg = 3; TS = 2; STS = 1

Kepala BBVF Pusvetma

 Drh. Edi Budi Susila, M.Si.

KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
 Nama Responden : drh. Dwi Kurnia Lestari, M.Si.
 Jabatan : Subkoordinator Kelompok Pengujian Mutu
 Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:

SS = 5; S = 4; Rg = 3; TS = 2; STS = 1

Subkoordinator Pengujian Mutu

 drh. Dwi Kurnia Lestari, M.Si.



KUESIONER
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA HEWAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar Veteriner Farnia Puswetma
 Nama Responden : Drh. Firdaus Lingga Kusuma, M.Sc
 Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana
 Kegiatan Sarana Prasarana Hewan Laboratorium Tahun 2023 : Sarana/Fasilitas Hewan Laboratorium

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat kesesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasana laboratorium terpasang	✓				

Keterangan:

SS = 5; S = 4; Rg = 3; TS = 2; STS = 1


 Pengelola Sarana dan Prasarana
 Drh. Firdaus Lingga Kusuma, M.Sc

FORM KUESIONER PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM KESMAVET

Unit Kerja : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
 Nama Responden : drh. Hari Sakti Pancasunu
 Kegiatan Sarana Prasarana Kesmavet Tahun 2023 : Pengadaan rak kandang stainless steel hewan percobaan 6 unit

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitas Laboratorium diadakan sesuai dengan analisis kebutuhan	✓				
2	Fasilitas laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	✓				
3	Terdapat ketidaksesuaian fasilitas yang diterima dengan yang diajukan	✓				
4	Fasilitas sarana prasarana digunakan sesuai dengan peruntukannya	✓				
5	Fasilitas sarana prasarana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	✓				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah fasilitas sarana prasarana laboratorium terpasang	✓				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasarana laboratorium terpasang	✓				


 Januari 2025
 drh. Hari Sakti Pancasunu



Parameter Penilaian Pemanfaat Sarana dan Prasarana Unit Usaha Madu					Skor	Acuan
II. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana						
1. Apakah Anda mengetahui adanya fasilitas penanganan madu yang disediakan?						
a. Ya					2	2
b. Tidak						
2. Seberapa sering Anda menggunakan fasilitas penanganan madu tersebut?						
a. Rutin (Setiap produksi)					2	2
b. Sese kali						
c. Tidak Pernah						
3. Fasilitas apa saja yang paling sering Anda gunakan? (Boleh memilih lebih dari satu)						
Fasilitas	Rutin	sese kali	Tidak pernah	Keterangan		
a. Ruang penerimaan bahan baku	v				2	2
b. Ruang penyaringan madu	v				2	2
c. Ruang dehum				Belum ada pesanan	1	2
d. Ruang pengemasan dan penyimpanan	v				2	2
e. Ruang display produk	v				2	2
f. fasilitas lainnya	v				2	2
4. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan produksi madu Anda?						
a. Ya						
b. Tidak					1	2
Jika tidak, mohon sebutkan kekurangannya: _____						
5. Apakah fasilitas tersebut membantu meningkatkan kualitas produk madu Anda?						
a. Ya					2	2
b. Tidak						
Jelaskan alasannya: _____						
6. Apakah fasilitas tersebut mempermudah proses pengemasan dan distribusi produk?						
a. Ya					2	2
b. Tidak						
III. Dampak Ekonomi						



1. Apakah penggunaan fasilitas ini berdampak pada peningkatan jumlah produksi madu?		
a. Ya	2	2
b. Tidak		
2. Apakah fasilitas ini membantu meningkatkan penjualan produk madu Anda?		
a. Ya	2	2
b. Tidak		
3. Berapa persentase kenaikan penjualan madu setelah menggunakan fasilitas ini?		
a. <10%	0.5	2
b. 10-30%		
c. 31-50%		
d. >50%		
4. Apakah fasilitas ini membantu Anda dalam memperoleh sertifikasi NKV atau registrasi produk madu?		
a. Ya	2	2
b. Tidak		
IV. Saran dan Masukan		
1. Saran Anda untuk pengembangan fasilitas penanganan madu di masa depan:		

2. Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang Anda butuhkan terkait pengelolaan usaha madu?		
a. Ya, sebutkan:		

b. Tidak		
	Total Skor	25 30
	% Pemanfaatan	87 %



KUESIONER PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT USAHA MADU

I. Identitas Responden

- Nama : Ahmad Saifi
- Usia : 40 th
- Jenis Kelamin : L
- Nama Kelompok Usaha : Harapan Keluarga
- Lama Usaha (tahun) : mulai dari 2020
- Jumlah Produksi Madu per Bulan (liter) : tidak menentu ke berbagai pesawar bisa 10 liter

II. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- Apakah Anda mengetahui adanya fasilitas penanganan madu yang disediakan?
 - Ya
 - Tidak
- Seberapa sering Anda menggunakan fasilitas penanganan madu tersebut?
 - Rutin (Setiap produksi)
 - Sekali
 - Tidak Pernah
- Fasilitas apa saja yang paling sering Anda gunakan? (Boleh memilih lebih dari satu)

Fasilitas	Rutin	sekali	Tidak pernah	Keterangan
a. Ruang penerimaan bahan baku	<input checked="" type="checkbox"/>			
b. Ruang penyaringan madu	<input checked="" type="checkbox"/>			
c. Ruang dehum				belum ada pesawar
d. Ruang pengemasan dan penyimpanan	<input checked="" type="checkbox"/>			
e. Ruang display produk	<input checked="" type="checkbox"/>			
f. Fasilitas lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>			

- Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan produksi madu Anda?
 - Ya
 - Tidak
 Jika tidak, mohon sebutkan kekurangannya: bangunan belum jadi dan belum selesai
- Apakah fasilitas tersebut membantu meningkatkan kualitas produk madu Anda?
 - Ya
 - Tidak
 Jelaskan alasannya: _____

- Apakah fasilitas tersebut mempermudah proses pengemasan dan distribusi produk?
 - Ya
 - Tidak

III. Dampak Ekonomi

- Apakah penggunaan fasilitas ini berdampak pada peningkatan jumlah produksi madu?
 - Ya
 - Tidak
- Apakah fasilitas ini membantu meningkatkan penjualan produk madu Anda?
 - Ya
 - Tidak
- Berapa persentase kenaikan penjualan madu setelah menggunakan fasilitas ini?
 - <10%
 - 10-30%
 - 31-50%
 - >50%
- Apakah fasilitas ini membantu Anda dalam memperoleh sertifikasi HKV atau registrasi produk madu?
 - Ya
 - Tidak

IV. Saran dan Masukan

- Saran Anda untuk pengembangan fasilitas penanganan madu di masa depan:

saya/kami berharap bangunan ini di lanjutkan pesawar atau nya sampai selesai
- Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang Anda butuhkan terkait pengelolaan usaha madu?
 - Ya, sebutkan: _____
 - Tidak

Tanda Tangan Responden dan Cap kelompok



Hasil Kuesioner Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

FORM KUESIONER PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM KESMAVET

- Unit Kerja : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
 Nama Responden : drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si
 Kegiatan : Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet Tahun 2023
- Peralatan dan Mesin Laboratorium (Biosafety Cabinet)
 - Peralatan dan Mesin Laboratorium (PC Bioinformatika)
 - Peralatan dan Mesin Laboratorium (Water bath Shaker)
 - Peralatan dan Mesin Laboratorium (PCR Real time)

No	Pernyataan	SS	S	Rg	TS	STS
1	Fasilitasi laboratorium diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	Fasilitasi laboratorium sesuai dengan waktu perencanaan kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	Terdapat ketidaksesuaian yang diterima dengan yang diajukan				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Fasilitas sarana prasarana digunakan dengan peruntukannya	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	Fasilitas sarana prasarana terpasang pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	Terdapat peningkatan kecepatan penyelesaian pengujian setelah setelah sarana prasarana terpasang	<input checked="" type="checkbox"/>				
7	Personel laboratorium merasa nyaman setelah sarana prasarana laboratorium terpasang	<input checked="" type="checkbox"/>				

Bogor, 31 Desember 2024
 Subkoordinator Pelayanan Teknis

Drh. Diyan Cahyaningsari, MSi
 NIP 19810921 200501 2 001



Produksi Madu Kelompok Tani Harapan Keluarga Tahun 2023- 2024
 Jenis madu :

Tahun	Bulan	Jumlah Produksi (ML)	Jumlah Kemasan
2023	Januari		40 botol kemasan 100 ml,
2023	Februari	9.000 ML	18 botol kemasan 500 ml
2023	Maret	8.750 ML	35 botol kemasan 250 ml
2023	April	3.750 ML	15 botol kemasan 250 ml
2023	Mei	20.250 ML	35 botol kemasan 150 ml
2023	Juni	2.000 ML	1 botol kemasan 500 ml
2023	Juli	—	kosong Pesanan
2023	Agustus	100.000 ML	200 botol kemasan 500 ml
2023	September	20.000 ML	200 botol kemasan 100 ml
2023	Oktober	2.150 ML	21 botol kemasan 150 ml
2023	November	5.000 ML	10 botol kemasan 500 ml
2023	Desember	3.000 ML	12 botol kemasan 250 ml
2024	Januari	7.500 ML	30 botol kemasan 250 ml
2024	Februari	9.250 ML	37 botol kemasan 250 ml
2024	Maret	—	kosong tidak ada Pesanan
2024	April	8.000 ml	80 botol kemasan 100 ml
2024	Mei	9.000 ml	18 botol kemasan 500 ml
2024	Juni	3.500 ml	7 botol kemasan 500 ml
2024	Juli	4.800 .ml	22 botol kemasan 150 ml
2024	Agustus	—	kosong Pesanan
2024	September	6.750 ML	15 botol kemasan 150 ml

Tahun	Bulan	Jumlah Produksi (ML)	Jumlah Kemasan
2024	Oktober	6.000 ML	12 botol kemasan 500 ml
2024	November	4.500 ML	18 botol kemasan 250 ml
2024	Desember	9.500 ML	19. botol kemasan 500 ml

Penjelasan: data ini berdasar kan Pesanan yang masuk ke kelompok

Kelompok Tani Harapan Keluarga
 Ketua
 TTD
 Nama Jelas dan Temp
 Ahmad Saif



Lampiran 14. Status wilayah terhadap kasus penyakit Rabies dan Anthrax pada tahun 2024 dibandingkan dengan kasus di tahun 2023

Provinsi	Kasus rabies			Kasus antraks		
	2023	2024	Status	2023	2024	Status
Aceh	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Bali	9	6	Terkendali	0	0	Terkendali
Bangka Belitung	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Banten	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Bengkulu	1		Terkendali	0	0	Terkendali
Di Yogyakarta	0		Terkendali	36	38	Tidak Terkendali
Dki Jakarta	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Gorontalo	0	2	Tak Terkendali	0	0	Terkendali
Jambi	1		Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Barat	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Jawa Tengah	0		Terkendali	5	0	Terkendali
Jawa Timur	0		Terkendali	21	0	Terkendali
Kalimantan Barat	16	7	Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Selatan	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Tengah	3		Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Timur	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Kalimantan Utara	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Kepulauan Riau	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Lampung	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku	12	2	Terkendali	0	0	Terkendali
Maluku Utara	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Barat	2	10	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Nusa Tenggara Timur	30	41	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Papua	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Barat	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Barat Daya	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Pegunungan	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Selatan	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Papua Tengah	0		Terkendali	0	0	Terkendali



Riau	2	5	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Barat	1		Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Selatan	18	3	Terkendali	0	1	Tidak Terkendali
Sulawesi Tengah	2	1	Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Tenggara	0		Terkendali	0	0	Terkendali
Sulawesi Utara	21	5	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Barat	9	3	Terkendali	5	0	Terkendali
Sumatera Selatan	5	4	Terkendali	0	0	Terkendali
Sumatera Utara	24	14	Terkendali	0	0	Terkendali
Total	156	103		67	39	



Lampiran 15. Realisasi Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah Disusun

No.	Dokumen NSPK	Rincian Dokumen yang Disusun
1.	NSPK Pengawasan Keamanan Produk Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Pedoman Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 2. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas HPM dalam Wilayah NKRI.
2.	NSPK Sanitary dan Standardisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Permentan 17 Tahun 2022 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara/Zona.
3.	NSPK Higiene, Sanitasi dan Penerapan	Draft Revisi Permentan No 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Produk Hewan
4.	NSPK Kesejahteraan Hewan	<p>1 Rapat NSPK membahas Rancangan Permentan tentang Tata Cara Pendirian dan Standar Pengelolaan Selter Hewan untuk Hewan Telantar.</p> <p>Rapat Analisis Legislasi terhadap Substansi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan dengan Biro Hukum Kementerian Pertanian.</p>
5.	NSPK Zoonosis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) menjelang Hari Raya 2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies melalui Lalu Lintas Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR) 3. Rancangan Akhir Peraturan Menteri



		<p>Pertanian tentang Jenis dan Kriteria Hewan Potong serta Persyaratan Cara yang Baik dan Pengawasan di Rumah Potong Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Draft Pedoman Teknis Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di Rumah Potong Hewan-Unggas 5. Pedoman Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Penggerak dalam Penyadaran Zoonosis pada Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
6.	NSPK Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Petunjuk Kerja Pengendalian Pemotongan Betina Produktif



